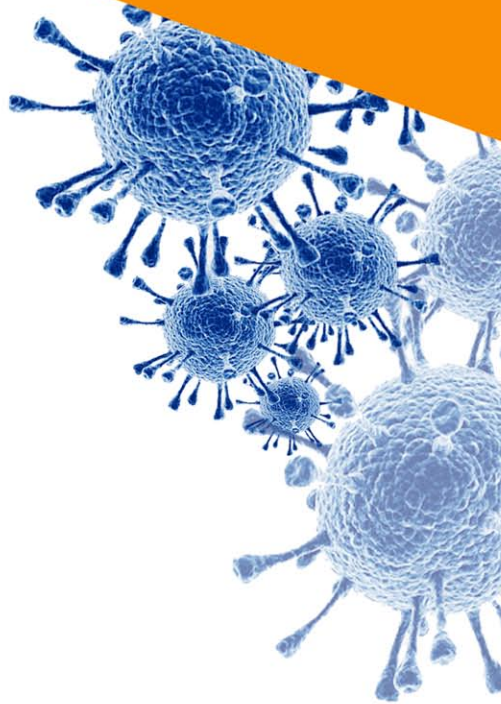


Mulia Ardi

**ERICH FROMM DAN
KETIDAKPATUHAN PUBLIK
DI MASA PANDEMI COVID-19**



ISBN 978-623-6681-28-2



Alim's Publishing
Jl. Waru No: 15
Rawamangun – Jakarta Timur

ERICH FROMM DAN KETIDAKPATUHAN PUBLIK DI MASA PANDEMI COVID-19

**ERICH FROMM DAN
KETIDAKPATUHAN PUBLIK
DI MASA PANDEMI COVID-19**



ERICH FROMM

Mulia Ardi

**ERICH FROMM DAN
KETIDAKPATUHAN PUBLIK
DI MASA PANDEMI COVID-19**

Penulis:

Mulia Ardi

Alim's Publishing

Jakarta

2021

Erich Fromm dan Ketidakpatuhan Publik di Masa Pandemi Covid-19

Penerbit : Alim's Publishing Jakarta – Juni 2021
NO ISBN : 978-623-6681-28-2

Penulis : Mulia Ardi
Editor : -
Layout Isi : Agung Prasetyo
Cetakan : Pertama

Diterbitkan oleh :

Alim's Publishing Jakarta

Jl. Waru no. 15 Rawamangun Jakarta Timur

Email: mauludiali94@yahoo.co.id (Hp 0877565773840)

Website : www.alimpublishing.com(Hp. 081384086640)

Anggota Ikatan Penerbit Indonesia(IKAPI)

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan
sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam
bentuk apapun secara elektronik maupun
mekanis tanpa izin tertulis dari penerbit



Penerbit
Alim's Publishing
Jl. Waru No: 15
Rawamangun – Jakarta Timur

PRAKATA

Puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku yang berjudul “Erich Fromm dan Ketidakpatuhan Publik di Masa Pandemi Covid-19”. Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Teladan bagi kita semua dalam mengarungi kehidupan.

Penulisan buku ini dimaksudkan sebagai referensi bagi para akademisi di bidang ilmu kefilosafatan dan sekaligus menambah bacaan alternatif seputar Covid-19.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan buku ini, sehingga penulis mohon perkenan kritik dan saran dari banyak pihak demi kesempurnaan buku di masa mendatang. Terakhir, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya buku ini. Semoga buku ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Yogyakarta, Juni 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v
 BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
1. Sumber Data.....	13
2. Langkah Penelitian.....	13
3. Analisis Hasil.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	15
 BAB II PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE	
2019 (COVID-19)	17
A. Pandemi Covid-19.....	17
B. Penanganan dan Pencegahan Pandemi	
Covid-19.....	21

1. Strategi dan Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi	21
2. Protokol Kesehatan	24
 BAB III BIOGRAFI DAN KARYA-KARYA	
ERICH FROMM	29
A. Kelahiran dan Karya-Karya Erich Fromm.	29
B. Konsep Ketidakpatuhan menurut Erich Fromm	35
 BAB IV MENILIK KETIDAKPATUHAN PUBLIK DI MASA PANDEMI MENURUT ERICH FROMM	
	49
A. Tipologi Ketidakpatuhan Publik di Masa Pandemi	49
B. Telaah Ketidakpatuhan Publik di Masa Pandemi menurut Erich Fromm ...	58
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	82
 DAFTAR PUSTAKA.....	
	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19 sampai dengan hari ini masih menjadi isu bersama. Seluruh negara di berbagai penjuru dunia berjuang keras mengatasi pandemi Covid-19. Sebagian berhasil membatasi dan mengurangi tingkat penularan Covid-19 namun sebagian yang lain justru terpuruk dan mengalami peningkatan penularan yang cukup pesat. Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat penyebaran Covid-19 tertinggi di dunia. Berdasarkan data di 98 negara, Institut Lowy memosisikan Indonesia di peringkat 85 dengan indeks 24,7 (10 Negara Paling Berhasil Tangani Covid, Indonesia Termasuk?, www.Republika.com, diakses tanggal 21 Februari 2021)

Peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia ditengarai sejumlah faktor. Salah satu indikasi utama adalah ketidakdisiplinan atau ketidakpatuhan masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan yang menjadi kunci utama pencegahan Covid-19. Protokol kesehatan adalah ketentuan yang ditetapkan pemerintah sebagai standar dalam adaptasi kebiasaan baru (*new normal*) di masyarakat guna mencegah dan mengendalikan penularan Covid-19.

Ketentuan tersebut terdiri dari penggunaan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan atau yang dikenal dengan istilah 3 M.

Tingkat kepatuhan publik terhadap protokol kesehatan dalam banyak kesempatan dinilai belum memuaskan. Beberapa kasus ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan ditemukan di sejumlah daerah. Tren kepatuhan publik menurut data satuan tugas penanganan Covid-19 mengalami penurunan terutama pada saat libur panjang 28 Oktober – 1 November 2020. Persentase kepatuhan penggunaan masker 58,32% sedangkan menjaga jarak 43,46% (www.covid19.go.id diakses 3 Maret 2021). Ketidakpatuhan publik terhadap protokol kesehatan tidak hanya terjadi di kota besar, namun juga kota-kota kecil di seluruh wilayah Indonesia.

Tren ketidakpatuhan publik yang semakin menguat menunjukkan problem kesadaran publik terhadap Covid-19. Kesadaran kolektif dalam menjalankan protokol kesehatan rupanya masih menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi sebagian masyarakat (Mengikis Ketidakpatuhan pada Protokol Kesehatan, news.detik.com, diakses 2 Maret 2021). Problem ini sesungguhnya merupakan problem bersama yang melibatkan pemerintah dan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini bukan satu-satunya pihak yang memicu peningkatan jumlah penularan kasus, pemerintah dalam

hal ini dinilai turut pula berkontribusi atas eskalasi ketidakpatuhan publik secara umum terhadap protokol kesehatan.

Tagar #IndonesiaTerserah (Riset PolGoV UGM Ungkap Sinisme Publik pada pemerintah Dalam Tangani Covid-19, www.ugm.ac.id, diakses 2 Februari 2021) menunjukkan situasi ketidakpedulian publik terhadap upaya penerapan protokol kesehatan. Pemerintah dinilai tidak konsisten dalam penanganan pandemi. Kebijakan pemerintah yang ragu dan berubah-ubah memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sejumlah kasus di tanah air seperti keramaian di pusat perbelanjaan, antrian di bandara dan tempat-tempat lain terutama lokasi wisata membuktikan bahwa pemerintah gagal mengeksekusi aturan yang dibuat sendiri. Pemerintah dinilai tidak cakap dalam mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan. Situasi ini tentu semakin memperkeruh kondisi di masa pandemi dan mendorong publik untuk enggan mematuhi kebijakan protokol kesehatan.

Publik juga menilai bahwa pemerintah mempunyai kepentingan lain di luar penanganan Covid-19. Prioritas yang ditetapkan pemerintah dengan mendahulukan kepentingan ekonomi memberi isyarat bahwa kesehatan bukan hal yang utama. Kebijakan pemerintah yang memberi kelonggaran di sektor ekonomi justru memberi jalan bagi peningkatan jumlah kasus Covid-

19. Masyarakat dengan tingkat pengawasan yang minim justru bersikap permisif terhadap protokol kesehatan. Publik berdalih bahwa urusan ekonomi lebih penting dibandingkan Covid-19.

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa kebijakan pemerintah terkait Covid-19 tidak lebih merupakan upaya pencitraan pemerintah. Keberpihakan pemerintah kepada rakyat di masa pandemi tak ubahnya seperti kebijakan-kebijakan lain pemerintah yang mementingkan popularitas atau rating. Situasi politis masyarakat yang terpolarisasi mempersulit upaya penanggulangan Covid-19. Alih-alih mematuhi kebijakan protokol kesehatan, publik justru mencurigai kebijakan pemerintah sarat akan kepentingan.

Kasus yang beredar di masyarakat dan melibatkan institusi rumah sakit serta tenaga kesehatan disinyalir kental bermotif ekonomi. Kasus yang ditemukan di sejumlah daerah mengafirmasi bahwa di balik Covid-19 terdapat sejumlah motif yang sengaja dimanfaatkan oleh segelintir pihak demi meraup keuntungan pribadi. Situasi ini semakin memperkuat resistensi publik di tengah gencarnya upaya pemerintah menggalakkan protokol kesehatan dan memaksa publik untuk menolak patuh terhadap kebijakan pemerintah.

Ketidakpatuhan menurut Erich Fromm merupakan perilaku alami manusia. Sejarah manusia sejatinya diawali dengan ketidakpatuhan. Namun demikian,

dalam perkembangan peradaban manusia, ketidakpatuhan dianggap sebagai dosa atau kesalahan sehingga melalui sejumlah sistem kehidupan, manusia dirancang dan dibentuk untuk berperilaku patuh atau tunduk. Manusia yang sebelumnya memberontak atau menolak patuh kini berakhir dalam kondisi terbelenggu oleh sistem artifisial yang diciptakan untuk menundukkan manusia.

Meskipun dalam peradaban manusia, kepatuhan kerap dimanipulasi demi sejumlah kepentingan, situasi ini tidak bisa dianggap sama. Ada banyak alasan di balik rekayasa kepatuhan termasuk kepatuhan yang dituntut terhadap protokol kesehatan. Kepatuhan terhadap protokol kesehatan tidak tepat dinilai sebagai upaya melegitimasi kepentingan tertentu. Kepatuhan dalam situasi pandemi merupakan panggilan mengingat situasi pandemi membutuhkan kesadaran semua pihak untuk secara kolektif mengatasi pandemi.

Kepatuhan dan ketidakpatuhan ibarat dua sisi mata uang. Kepatuhan terhadap sesuatu berarti ketidakpatuhan kepada yang lain. Begitu pula sebaliknya. Keduanya meskipun saling beroposisi namun tetap saling berhubungan. Fromm menilai bahwa ketidakpatuhan merupakan sarana memperkuat atau menegaskan jati dirinya sebagai manusia hanya jika ketidakpatuhan itu diletakkan dalam bingkai kesadaran nurani. Penolakan publik terhadap protokol

kesehatan menunjukkan bahwa ada sesuatu yang bertolak belakang dengan sisi humanis manusia. Persoalan ini memerlukan jalan keluar agar kemanusiaan manusia tetap utuh dan memperoleh porsi yang tepat.

Ketidakpatuhan semestinya dibaca bukan sebagai tindak pembangkangan. Ketidakpatuhan publik terhadap protokol kesehatan menunjukkan bahwa ada sejumlah persoalan yang harus diselesaikan. Penolakan publik terhadap protokol kesehatan bukan tanpa alasan. Pemerintah perlu menilik secara tepat problem yang melatarbelakangi publik enggan untuk patuh dan disiplin terhadap protokol kesehatan.

Pembacaan atas ketidakpatuhan publik di masa pandemi menurut perspektif Erich Fromm ditujukan sebagai upaya membangun kesadaran bersama akan pentingnya mencegah penularan Covid-19. Ketidakpatuhan tidak bisa diperlakukan sebagai perilaku menentang atau menyelisihi kebijakan pemerintah. Ketidakpatuhan merupakan reaksi publik yang semestinya disikapi secara tepat dengan sejumlah pendekatan relevan. Ketidakmampuan atau kegagalan pemerintah membaca ketidakpatuhan publik akan berdampak pada menguatnya resisten publik terhadap pemerintah karena pendekatan yang diterapkan umumnya bersifat represif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut;

1. Bagaimana tipologi ketidakpatuhan publik di masa pandemi Covid-19?
2. Apa dan bagaimana konsep Erich Fromm tentang ketidakpatuhan?
3. Bagaimana analisis ketidakpatuhan publik di masa pandemi Covid-19 dalam perspektif Erich Fromm?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tipologi ketidakpatuhan publik di masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui pemikiran Erich Fromm tentang ketidakpatuhan.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui ketidakpatuhan publik di masa pandemi Covid-19 menurut perspektif Erich Fromm.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat secara teoritis maupun praksis. Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu:

1. Memberi sumbangan teoritis dan konseptual bagi kajian pemikiran Erich Fromm.
2. Sebagai referensi bagi penelitian lain tentang ketidakpatuhan menurut Erich Fromm.

Sedangkan manfaat praksis penelitian ini antara lain:

1. Sebagai acuan dalam menyikapi ketidakpatuhan publik di masa pandemi Covid-19.
2. Sebagai pertimbangan dalam menghadapi resistensi publik di masa pandemi Covid-19.

E. Kajian Pustaka

Tulisan pertama yang mengangkat objek material melalui pendekatan studi kasus datang dari Ratna Kartika Sari melalui tulisannya yang berjudul *Identifikasi Penyebab Ketidakpatuhan Warga terhadap Penerapan Protokol Kesehatan 3 M di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pelanggar Protokol Kesehatan 3 M di Ciracas Jakarta Timur)*. Dalam tulisannya, Sari mencermati kasus pelanggaran protokol kesehatan 3 M di wilayah Ciracas Jakarta Timur dan mengidentifikasi penyebab pelanggaran prokes di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan masyarakat terhadap prokes lebih disebabkan oleh

ketidaktahuan masyarakat mengenai Covid-19. Publik tidak memperoleh informasi yang memadai seputar Covid-19 sehingga cenderung meremehkan dan tidak memedulikan situasi pandemi. Sari juga mengidentifikasi bahwa salah satu penyebab publik abai dari prokes adalah ketidaktepatan sosialisasi kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah tentang Covid-19 tidak diikuti dengan sosialisasi yang tepat sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan keraguan masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa era *new normal* merupakan era di mana masyarakat boleh beraktivitas secara normal.

Tulisan kedua berjudul *Kepatuhan Pengunjung Puskesmas terhadap Protokol Kesehatan 3 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak dan Menghindari Kerumunan)*. Tulisan Harmawati dan Etri Yanti menyajikan studi kasus pada Puskesmas Belimbing, Kuranji, Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prokes di puskesmas terbilang rendah. Diperlukan sejumlah upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat antara lain melalui sosialisasi dan diskusi bersama melibatkan segenap komponen masyarakat. Upaya ini dinilai penting bagi upaya mencegah penularan Covid-19.

Laode Harjudin dalam tulisan berjudul *Dilema Penanganan Covid-19 antara Legitimasi Pemerintah*

dan *Kepatuhan Masyarakat* menyatakan bahwa pemerintah mengalami krisis legitimasi dalam penanganan Covid-19. Situasi ini menimbulkan resistensi publik terhadap pemerintah. Publik menolak mematuhi kebijakan pemerintah. Harjudin menduga hal ini terjadi akibat pencitraan politik yang berlebihan sehingga berdampak pada sulitnya mendapatkan kepatuhan publik. Upaya pemerintah menanggulangi Covid-19 dinilai publik hanya sebagai bagian dari pencitraan dan bukan upaya sungguh-sungguh mengatasi Covid-19.

Tulisan keempat berasal dari Ahmad Ghiffari, Hibsah Ridwan dan Akhmad Al Akbar Purja yang berjudul *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ketidakpatuhan Masyarakat Menggunakan Masker Pada Saat Pandemi Covid-19 di Palembang*. Penelitian berjenis observasional ini bertujuan untuk mengetahui penyebab ketidakpatuhan masyarakat di kota Palembang terhadap penggunaan Masker. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, yakni pengetahuan, kenyamanan, ketersediaan sarana, akses informasi, dan sistem pengawasan. Tulisan serupa datang dari tulisan keempat yang berjudul *Pengetahuan dan Sikap dengan Kepatuhan Penggunaan Masker sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada pedagang UMKM*. Tulisan karya Mushidah dan Ratna Muliawati

menggunakan jenis penelitian yang sama dengan tulisan sebelumnya yakni penelitian observasional. Penelitian ini mengambil lokasi di alun-alun Kutoharjo Kaliwungu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara kepatuhan dengan tingkat pengetahuan.

Tulisan terakhir dengan objek material yang tidak jauh berbeda dengan tulisan-tulisan sebelumnya adalah tulisan Tarianna Ginting, Dhian Ladea Kaban dan Rapael Ginting. Tulisan berjudul *Kepatuhan Pedagang Pasar Pagi dalam Melaksanakan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19* menggunakan metode survey sebagai metode penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara pelaksanaan proses dengan tingkat pendidikan, pengetahuan dan juga lingkungan sosial.

Tulisan dengan objek formal perspektif Erich Fromm ditemukan di sejumlah penelitian berikut;

1. *Ideologi Manusia Menurut Erich Fromm (Perpaduan Psikonalisis Sigmund Freud dan Kritik Sosial Marx)* karya N. Sutikna.
2. *Konsep Manusia Menurut Erich Fromm (Studi tentang Aktualisasi Perilaku)* karya J. Wicoyo.
3. *Konsep Cinta Menurut Erich Fromm; Upaya Menghindari Tindak Kekerasan dalam Pacaran* karya SG Apriantika.

Ketiga tulisan di atas menempatkan perspektif Erich Fromm sebagai pisau analisis dalam mengurai berbagai objek material.

Berdasarkan kajian terhadap tulisan maupun penelitian yang ada dapat disimpulkan bahwa penelitian terkait ketidakpatuhan publik di masa pandemi Covid-19 menurut Erich Fromm belum pernah dilakukan sebelumnya. Seluruh penelitian di atas berbeda dalam memosisikan objek material dan formal penelitian. Objek formal penelitian di atas yang dalam hal ini adalah perspektif Erich Fromm digunakan untuk menganalisis objek material berbeda begitu pula dengan objek material penelitian didekati dengan objek formal yang berlainan dengan yang dilakukan dalam penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian deskriptif kualitatif kefilsafatan dengan pendekatan studi kepustakaan. Penelitian kualitatif dipilih dengan pertimbangan bahwa penelitian ini tidak melibatkan prosedur statistik atau berupa angka-angka seperti yang dikemukakan Strauss dan Corbin (2015: 4). Pendekatan kepustakaan dalam penelitian diarahkan dan ditekankan pada olahan kebermaknaan secara filosofis dan teoritis (Kaelan, 2012: 6).

1. Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan bahan yang bersifat primer dan sekunder. Bahan primer bersumber dari berbagai literatur yang membahas tentang objek material yakni ketidakpatuhan publik di masa pandemi. Sedangkan bahan sekunder merujuk pada literatur yang berkaitan dengan objek formal penelitian yakni tulisan Erich Fromm yang berjudul *On Disobedience and Other Essays*.

2. Jalan Penelitian

a. Pengumpulan Data.

Data-data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder yang relevan dengan objek material maupun objek formal. Data-data tersebut dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan objek penelitian yang diteliti.

b. Pengolahan Data

Data-data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menerapkan unsur-unsur metodis yang telah ditetapkan guna memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian.

c. Penyusunan Penelitian

Penelitian sepenuhnya disusun dengan berpedoman pada sistematika dan aturan baku penelitian yang telah direncanakan sebelumnya.

3. Analisis Hasil

Analisis hasil dalam penelitian ini dilakukan dengan menerapkan unsur-unsur metodis sebagai berikut:

a. Deskripsi

Membahasakan keseluruhan masalah penelitian latar belakang penelitian dan hasil penelitian secara komprehensif sebagai satu kesatuan yang utuh dan bulat agar diperoleh pemahaman yang tepat terhadap penelitian.

b. Interpretasi

Data-data yang diperoleh dalam penelitian diinterpretasikan secara relevan sesuai tujuan penelitian agar ditemukan makna terdalam dari penelitian.

c. Koherensi

Seluruh bagian dalam penelitian dihubungkan secara logis (koheren) sehingga ditemukan suatu struktur yang konsisten dan tidak bertentangan satu sama lain (Bakker dan Zubair, 1990: 46).

d. Heuristika

Menemukan suatu jalan atau pemahaman baru dalam rangka memecahkan persoalan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

e. Holistika

Menghubungkan secara menyeluruh semua kemungkinan dan relasi yang dapat ditemukan dalam penelitian sebagai suatu totalitas.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan pada penelitian ini menerapkan struktur pendahuluan, isi dan penutup. Sistematika pembahasan secara spesifik disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*

Bab ini memaparkan pengertian dan asal mula pandemi Covid-19 serta pencegahan dan penanganan Covid-19 melalui kebijakan protokol kesehatan.

Bab III Biografi dan Pemikiran Erich Fromm

Bab ini membahas perihal kelahiran, pemikiran dan karya-karya Erich Fromm dan konsep ketidakpatuhan menurut Erich Fromm

Bab IV Menilik Ketidakpatuhan Publik terhadap Protokol Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 menurut Erich Fromm

Bab ini mengulas tipologi ketidakpatuhan publik terhadap protokol kesehatan dan telaah atas ketidakpatuhan publik terhadap protokol kesehatan menurut Erich Fromm.

Bab V **Penutup**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

A. Pandemi Covid-19

Coronavirus adalah virus *zoonosis* yang menginfeksi hewan atau manusia. Virus ini masuk dalam rumpun keluarga besar virus berjenis RNA. Yunus (2020:3) mengungkapkan bahwa *Coronavirus* adalah sekumpulan virus dari subfamili *Orthocoronavirinae* dalam keluarga *Coronaviridae* dan ordo *Nidovirales*. Virus yang menginfeksi manusia dan menimbulkan banyak korban jiwa di berbagai belahan dunia secara resmi dinyatakan sebagai pandemi oleh lembaga World Health Organization (WHO) pada tanggal 12 Maret 2020. Sebelumnya WHO pada tanggal 11 Februari 2020 melansir nama virus dan penyakit yang ditimbulkan dengan *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus - 2 (SARS-CoV-2)* dan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* (Yuliana, 2020: 188).

Virus Covid-19 pada awalnya menyerang unggas dan mamalia kemudian menyerang manusia dan menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan. Gejala ringan yang ditimbulkan oleh virus ini serupa dengan gejala penyakit batuk dan pilek pada umumnya. Namun

dalam kasus lain seperti *Middle East Syndrome* (MERS) *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19), virus ini bisa menyebabkan kematian. Covid-19 sendiri memiliki kesamaan dengan SARS dan MERS (Davis, 2021: 13). Gejala umum yang kerap dirasakan pasien antara lain demam ringan, letih dan lesu, batuk kering, sakit kepala serta sesak napas. Gejala lain turut pula dialami pasien seperti radang tenggorakan, ruam kulit, mual dan diare. Dalam kondisi berat, pasien merasakan gejala demam tinggi, batuk berdarah dan nyeri dada. Sejumlah pasien dilaporkan mengalami kesulitan pernapasan atau Pneumonia akut.

Penyakit Covid-19 ini ditularkan melalui kontak langsung antar manusia melaui perantara cairan *droplet* (dahak) penderita yang tersebar di udara. *Droplet* adalah partikel berisi air dengan diameter lebih dari 5-10 mikrometer. (Ghiffari, dkk. 2021: 451). Rerata masa inkubasi virus sekitar 4-6 hari. Infeksi Coronavirus ditandai dengan sakit atau nyeri tenggorokan disusul batuk kering. Virus selanjutnya masuk ke dalam paru-paru, menginfeksi jaringan sekitar paru-paru dan menyebabkan peradangan atau pembengkakan pada jaringan tersebut. Kerusakan yang disebabkan oleh virus ini bisa mengakibatkan pasien mengalami gagal napas sehingga perlu diberi alat bantu pernapasan (ventilator). Dalam kasus yang tertentu,

terjadi *Acute Respiratory Distress Syndrome* yang berimplikasi pada kematian.

Penyakit Covid-19 bermula dari penemuan kasus pneumonia pada penghujung tahun 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Sejumlah pasien terdiagnosa menderita *Acute Respiratory Distress Syndrome* (ARDS). Kasus ini cukup menarik perhatian karena peningkatannya yang pesat. Kurang dari satu bulan, penyakit ini telah menjangkiti hampir sebagian provinsi di Cina. Hasil analisis sampel virus menunjukkan Coronavirus baru. WHO pada tanggal 11 Februari mengumumkan nama penyakit tersebut dengan *Coronavirus Disease* yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2).

Persebaran Covid-19 terus meluas hingga ke manca negara. Sejumlah negara mulai melaporkan kejadian penularan Covid-19. Hingga kini hampir sebagian besar negara-negara di lintas benua terjangkiti Covid-19. Akhir Maret 2020, dunia telah menjadi episentrum pandemi Covid-19. Di Indonesia, kasus pertama Covid-19 teridentifikasi tanggal 2 Maret 2020 dengan ditemukannya dua kasus Covid-19. Tingkat penularan Covid-19 di Indonesia sendiri cukup tinggi demikian pula dengan tingkat mortalitas akibat Covid-19. Indonesia bahkan menduduki peringkat pertama penularan Covid-19 di Asia Tenggara.

Sejak penemuan kasus pertama Covid-19 di Jakarta bulan Maret 2020, pandemi terus meluas hingga ke 34 provinsi di Indonesia. Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah teridentifikasi sebagai provinsi dengan lonjakan kasus positif Covid-19 terbanyak. Tingkat kematian akibat Covid-19 menyentuh angka 100 ribu kematian. Angka ini terhitung sedikit dari keseluruhan kematian akibat Covid-19 yang tidak dilaporkan. Tren penularan Covid-19 di Indonesia cenderung bergerak fluktuatif. Pasca lonjakan kasus Covid-19 di bulan-bulan pertama penularan Covid-19, Indonesia sempat menurunkan tingkat penularan Covid-19. Namun, angka penularan kembali melonjak setelah pemerintah melonggarkan kebijakan pembatasan wilayah.

Pandemi Covid-19 yang semakin meluas dan meningkat pesat disikapi pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan pembatasan wilayah di antaranya pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Beberapa daerah dengan tingkat penularan tinggi memberlakukan kebijakan ini. Aturan ini kemudian diubah dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di tingkat kabupaten dan kota. Kebijakan pemerintah terkait Covid-19 berlanjut dengan dengan dicanangkannya kebijakan vaksinasi nasional di awal tahun 2021 melalui program nasional vaksinasi Covid-19.

B. Penanganan dan Pencegahan Pandemi Covid-19

1. Strategi dan Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi

Pandemi Covid-19 yang menyelimuti dunia disikapi banyak negara dengan berbagai strategi dan kebijakan tanpa terkecuali Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat penularan Covid-19 tertinggi di dunia, no. 1 di Asia Tenggara dan juga Asia turut merespon pandemi Covid-19 dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait penanganan dan pencegahan Covid-19. Kebijakan pertama yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah penetapan status darurat kesehatan pada penghujung Maret 2020.

Pasca kejadian pertama positif Covid-19, pemerintah mengambil inisiatif melalui kebijakan penanganan pandemi Covid-19 dengan fokus utama pada sektor kesehatan. Melalui Keppres No. 7 Tahun 2020, dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (Gugus Tugas Covid-19) pada tanggal 13 Maret 2020. Pemerintah kemudian menerbitkan aturan terkait protokol kesehatan dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). PSBB dilakukan pemerintah dalam upaya menghentikan laju penularan Covid-19 yang pesat. Pembatasan ini berlaku di sejumlah wilayah Indonesia baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Di bidang kesehatan, pemerintah mengupayakan rumah sakit rujukan Covid-19,

menyiapkan laboratorium dan mengencakan tes Covid-19. Tatanan normal baru atau adaptasi kebiasaan baru selanjutnya ditetapkan pemerintah sebagai kebiasaan sehari-hari di masa pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan (Merunut Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19 di Indonesia, kompaspedia.kompas.id, diakses 2 maret 2021).

Kebijakan pemerintah di masa pandemi tidak hanya berfokus pada sektor kesehatan. Pemerintah turut *concern* dengan dampak pandemi yang menasar di banyak bidang. Pada Juli 2020 pemerintah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Komite ini menaungi Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (STPC-19) (sebelumnya Gugus Tugas Covid-19) dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. Kebijakan ini diharapkan akan mampu mengatasi persoalan dan dampak yang ditimbulkan selama pandemi Covid-19 secara komprehensif.

Perluasan cakupan kebijakan pemerintah tidak mengesampingkan upaya pemerintah di bidang kesehatan. Upaya pemerintah dalam mengatasi Covid-19 merujuk pada penanganan Covid-19 WHO yakni menurunkan transmisi Covid-19 dan tingkat kematian akibat Covid-19. Strategi yang diterapkan pemerintah dalam kerangka ini meliputi penegakkan disiplin perilaku, kampanye protokol kesehatan dan vaksinasi

nasional. Aturan tentang protokol kesehatan diperkuat pemerintah dengan Inpres tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Aturan ini memperluas jangkauan penerapan protokol kesehatan dari yang bersifat imbauan hingga penindakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan. Pelanggaran atas protokol dikenakan sanksi berupa teguran lisan dan tulisan, kerja sosial, denda hingga penutupan dan pencabutan ijin tempat usaha.

Pada bulan Oktober 2020 STPC-19 membentuk bidang perubahan perilaku dengan tugas pokok mendorong perubahan perilaku masyarakat agar konsisten dengan 3 M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak). Perubahan ini didukung dengan berbagai program penunjang seperti sosialisasi terpadu tentang urgensi perubahan perilaku, mendorong ketersediaan sarana dan fasilitasi 3 M, insentif dan *reward* bagi inovasi dan kreativitas daerah yang menyukseskan program 3 M dan hukuman bagi pelanggaran 3 M.

Kebijakan terakhir pemerintah yang merupakan bagian dari upaya pencegahan Covid-19 di akhir tahun 2020 adalah pengadaan dan pelaksanaan vaksin Covid-19. Kebijakan ini ditujukan untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Kebijakan pemerintah dalam program vaksinasi meliputi pengadaan, pelaksanaan,

pendanaan dan dukungan serta fasilitasi kelembagaan pusat dan daerah.

Secara umum, kebijakan dan strategi pemerintah di masa pandemi dapat diringkas sebagai berikut;

- a. Pembentukan komite dan satuan tugas.
- b. Penganggaran dan pendanaan terkait upaya penanganan Covid-19.
- c. Sarana dan fasilitas kesehatan meliputi penyediaan rumah sakit dan laboratorium terpadu, kesiapan dan perlindungan tenaga medis, alat tes dan penentuan tarif tes Covid-19, dan penyediaan vaksin.
- d. Protokol kesehatan.
- e. Pembatasan meliputi pembatasan wilayah, berpergian, wisata dan hiburan, usaha, ibadah dan perayaan keagamaan, pendidikan (pembelajaran *online*), kedinasan serta pegawai (melalui mekanisme *work from home* (WFH)).

2. Protokol Kesehatan

Salah satu kebijakan pemerintah di bidang kesehatan dalam upaya menanggulangi Covid-19 adalah protokol kesehatan. Protokol kesehatan merupakan seperangkat aturan yang dikeluarkan oleh kementerian kesehatan yang mengatur aktivitas selama masa pandemi Covid-19. Kebijakan ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam beraktivitas secara aman.

Kebijakan protokol kesehatan didasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan RI No. Hk.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Protokol kesehatan telah menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat di masa pandemi. Penerapan protokol kesehatan berdasarkan pada pertimbangan bahwa setiap orang mempunyai resiko yang sama. Siapapun bisa tertular dan menularkan. Kenyataan bahwa Covid-19 bisa berakibat fatal maka penegakkan disiplin protokol kesehatan mutlak diperlukan. Penerapan protokol kesehatan secara konsisten dapat membantu menghentikan penularan Covid-19 dan mengatasi pandemi yang sampai saat ini masih berlangsung. Protokol kesehatan secara umum meliputi tindakan yang disingkat 3 M. Tindakan tersebut di antaranya:

a. Memakai masker.

Penggunaan masker dinilai sebagai tindakan preventif penularan Covid-19. Ghiffari, dkk (2021: 451) mengutip Zhang menyatakan bahwa penularan dapat dicegah dengan menggunakan alat pelindung diri yakni masker. Jika sebelumnya pemakai masker adalah penderita maka di masa pandemi, setiap orang

diwajibkan mengenakan masker terutama saat berada di luar rumah. Sejumlah negara termasuk Indonesia mengkampanyekan penggunaan masker di tempat terbuka atau fasilitas umum dan lokasi-lokasi yang ditengarai sangat berpotensi dan beresiko menularkan Covid-19.

b. Mencuci tangan.

Tangan merupakan salah satu anggota tubuh yang perlu diwaspadai terutama ketika menyentuh area wajah. Mencuci tangan dengan bersih selama kurang lebih 20 detik menggunakan sabun atau cairan pembersih secara frekuentif akan sangat membantu mencegah penularan Covid-19. Fasilitas umum melalui kebijakan protokol kesehatan diminta menyediakan sarana cuci tangan bagi khalayak atau konsumen.

c. Menjaga jarak.

Menjaga jarak minimal 1 meter diperlukan untuk menghindari paparan *droplet* (dahak) seseorang. Menjaga jarak termasuk juga menghindari kerumunan. Kerumunan merupakan perantara penyebaran Covid-19. Sehingga membatasi kerumunan melalui inisiatif menjaga jarak dinilai efektif mengatasi penularan Covid-19 (Merunut Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19 di Indonesia, kompaspedia.kompas.id, diakses 2 maret 2021).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. Hk.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, sejumlah tempat dan fasilitas umum yang perlu menerapkan protokol kesehatan antara lain:

- a. Pasar dan sejenisnya.
- b. Pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dan sejenisnya.
- c. Hotel/penginapan/homestay/asrama dan sejenisnya.
- d. Rumahmakan/restoran dan sejenisnya.
- e. Sarana dan kegiatan olah raga.
- f. Moda transportasi.
- g. Stasiun/terminal/pelabuhan/bandara.
- h. Lokasi daya tarik wisata.
- i. Jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya.
- j. Jasa ekonomi kreatif meliputi subsector arsitektur/seni pertunjukan, radio, televisi, film dan sejenisnya.
- k. Kegiatan keagamaan di rumah ibadah.
- l. Jasa penyelenggaraan event/pertemuan.

BAB III

BIOGRAFI DAN KARYA-KARYA ERICH FROMM

A. Kelahiran dan Karya-Karya Erich Fromm

Erich Fromm adalah salah satu tokoh Mazhab Frankfurt yang dikenal melalui karya-karyanya di bidang filsafat, sosiologi dan psikoanalisis. Pemikirannya yang luas dan lintas disiplin keilmuan membuatnya sejajar dengan para pemikir Mazhab Frankfurt lain seperti Adorno, Habermas, Foucault dan Horkheimer. Fromm sendiri termasuk penulis prolific. Karya-karyanya menyumbang banyak ide kreatif terkait nilai-nilai kehidupan dan masa depan kemanusiaan.

Masa lalu Fromm yang berlatar belakang situasi perang dingin menciptakan visi yang jauh dan mendalam tentang kesadaran etis bagaimana membangun tatanan kehidupan yang harmonis selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ia menuangkan gagasannya yang kompleks dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti termasuk saat menuliskan kritik sosial terhadap realitas masa itu. Kedekatannya dengan ide dan gagasan Marxisme membuatnya dicurigai sebagai bagian dari sosialisme, namun ia menolak dengan tegas tuduhan tersebut. John Pries dalam Fromm (2019: vii). menyatakan bahwa di dalam salah

satu bukunya, Fromm mengejek Marcuse sebagai, "tidak tahu marxisme secara utuh". Tudingan yang terus-menerus diarahkan kepada Fromm membuat Fromm akhirnya memilih berpisah jalan dengan Mazhab Frankfurt.

Erich Fromm lahir pada tanggal 23 Maret 1900 di kota Frankfurt, Jerman dari pasangan penganut Yahudi Ortodoks. Sebagai seorang Yahudi, masa kecil Fromm terdidik dalam alam pendidikan Yahudi yang kental. Fromm menimba ilmu dari tokoh-tokoh Yahudi Kosmopolitan seperti Hermann Cohen, Rabbi Nehemia Nobel dan Rabbi Salman Baruch Rabinkow. Kemampuannya sebagai seorang kritikus diperoleh salah satunya melalui didikan gurunya-gurunya tersebut. Situasi perang dingin yang dialami Fromm di masa mudanya menjadikannya dirinya sedemikian terobsesi dengan tema-tema perang dan kemanusiaan. Obsesinya ini nantinya ditemukan di sejumlah karya yang ditulisnya.

Fromm menyelesaikan pendidikannya di Universitas Frankfurt. Selama studi ia turut terlibat dalam pendirian *Freies Judische Lehrhaus* yang dipimpin oleh filsuf Martin Buber dan Franz Roseinweig. Sosiologi dipelajarinya melalui bantuan Alfred Weber, K. Jaspers, dan Heinrich Rickert. Fromm memperoleh gelar doktor tahun 1922 dari Universitas Heidelberg. Pada tahun 1924, Fromm

menekuni bidang psikoanalisa di Frankfurt dan Berlin Institute of Psychoanalysis. Fromm menikah dengan Frieda Reichman, seorang ahli psikoanalisa yang juga adalah mentornya. Pernikahan mereka tidak berlangsung lama namun Fromm dan Reichman masih tetap berhubungan dan saling mendukung satu sama lain khususnya dalam bidang psikoanalisis.

Fromm turut mendirikan The Frankfurt Psychoanalytic Institute dan atas kontribusinya di bidang psikoanalisa, ia diundang untuk terlibat dalam Frankfurt Institute for Social Research (Sekolah Frankfurt yang memopulerkan Mazhab Frankfurt). Kuatnya cengkeraman Hitler di Jerman memaksa The Frankfurt Psychoanalytic Institute berpindah ke Jenewa dan kemudian tahun 1934, ia beralih ke Universitas Columbia. Sebelum ke Amerika, Fromm sempat menetap di Davos selama beberapa bulan. Di Amerika, Fromm mengajar di banyak tempat, di antaranya, The New School of Social Research, Columbia, Yale dan Bennington.

Latar belakang Erich Fromm sebagai seorang psikoanalisis menjadikannya mampu mengkombinasikan psikonalisa Freud dengan beragam pendekatan sosial. Keberpihakan From terhadap psikonalisa Freud sendiri tidak bertahan lama. Fromm mulai mengajukan kritik terhadap pemikiran Freudian melalui sejumlah tulisan. Pada tahun 1941, terbit karya pertama Erich Fromm

yakni *Escape from Freedom. He charted the growth of freedom and self awareness from the middle age to modern times by using psychoanalytic techniques* (Erich Fromm, www.britannica.com, diakses 12 Maret 2021) Publikasi pertama Fromm ini mendapat sambutan dan respon hangat dari publik.

Tahun 1944, Fromm menikah untuk kedua kalinya dengan Henny Gurland. Kondisi Gurland yang tidak sehat membuatnya pindah ke Meksiko. Fromm selanjutnya mengajar di National Autonomous University, Mexico City. Kepindahannya ke Meksiko tidak membuat istrinya pulih. Istrinya meninggal pada tahun 1952, tepat dua tahun setelah kepindahan mereka ke Meksiko. Di Meksiko, Fromm ikut serta dalam pendirian The Mexican Institute of Psychoanalysis dan menjadi pimpinan hingga tahun 1976.

Setahun setelah kematian Istrinya, Fromm menikahi Annis Freeman. Fromm menghabiskan sebagian besar waktunya dengan mengajar di Amerika dan Meksiko. kegiatan ini dijalani Fromm hingga tahun 1967. Fromm tidak hanya berkutat dalam bidang akademis, ia juga aktif dan turut serta dalam sejumlah pergerakan dan aksi politik menyuarakan hak-hak sipil. Ia menulis banyak karya sepanjang tahun 1950 – 1960. Karya-karyanya kaya perspektif dan diminati banyak kalangan.

Karya terakhir Fromm ditulis pada tahun 1976 dengan judul *To Have or To Be*. Dalam karyanya ini Fromm membedakan antara memiliki dan menjadi. Manusia terus mengalami pergulatan dan pertarungan dalam diri terkait cara bereksistensi ‘memiliki’ dan ‘menjadi’. Memiliki mempunyai cara pandang bahwa segala sesuatu harus dimiliki. Cara ini melahirkan keserakahan dan konsumerisme yang berujung pada penguasaan dan agresi. Sebaliknya menjadi lebih bersifat emansipatoris karena berlatar cinta dan empati. Menjadi turut menyertakan yang lain dalam pengalaman bersama. Kemenjadian menurut Fromm tidak mungkin direngkuh jika manusia mengalienasi yang lain dari dirinya.

Fromm meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 1980 di Muralto, Swiss akibat serangan Jantung. Pasca kematiannya, istri Fromm, Annis Freeman mengumpulkan tulisan Fromm dalam *On Disobedience and The Other Essays*. Freeman wafat menyusul suaminya pada September 1985.

Berikut karya-karya Erich Fromm yang diterbitkan semasa hidup dan setelah kematiannya, beberapa di antaranya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia;

1. *Escape from Freedom*, tahun 1941.
2. *Man for himself, an inquiry into the psychology of ethics*, tahun 1947.

3. *Psychoanalysis and Religion*, tahun 1950.
4. *Forgotten language; an introduction to the understanding of dreams, fairy tales, and myths*, tahun 1951.
5. *The Sane Society*, tahun 1955.
6. *The Art of Loving*, tahun 1956.
7. *Sigmund Freud's mission; an analysis of his personality and influence*, tahun 1959.
8. *Psychoanalysis and Zen Buddhism*, tahun 1960.
9. *May Man Prevail? An inquiry into the facts and fictions of foreign policy*, tahun 1961.
10. *Marx's Concept of Man*, tahun 1961.
11. *Beyond the Chains of Illusion: my encounter with Marx and Freud*, tahun 1962.
12. *The Dogma of Christ and Other Essays on Religion, Psychology and Culture*, tahun 1963.
13. *The Heart of Man, its genius for good and evil*, tahun 1964.
14. *Socialist Humanism*, tahun 1965.
15. *You Shall Be as Gods: a radical interpretation of the Old Testament and its tradition*, tahun 1966.
16. *The Revolution of Hope, toward a humanized technology*, tahun 1968.
17. *The Nature of Man*, tahun 1968.
18. *The Crisis of Psychoanalysis*, tahun 1970.

19. *Social character in a Mexican village; a sociopschoanalytic study*, tahun 1970.
20. *The Anatomy of Human Destructiveness*, tahun 1973.
21. *To Have or to Be?*, tahun 1976.
22. *Greatness and Limitation of Freud's Thought*, tahun 1979.
23. *On Disobedience and Other Essays*, tahun 1984.
24. *The Art of Being*, tahun 1993.
25. *The Art of Listening*, tahun 1994.
26. *On Being Human*, tahun 1997.

B. Konsep Ketidakpatuhan menurut Erich Fromm

Ketidakpatuhan atau pembangkangan dalam banyak kebudayaan kerap dianggap sebagai tindakan berkonotasi negatif. Berbeda dengan kepatuhan yang dinilai sebagai kebajikan atau keutamaan. Ketidakpatuhan adalah tindakan salah, buruk atau nista. Anggapan ini lazim di tengah-tengah masyarakat dewasa ini. Namun demikian, jika menengok kembali ke sejarah umat manusia maka peradaban manusia justru bermula dari ketidakpatuhan atau pembangkangan. Menilik keadaan awal manusia sebelum di dunia, manusia berada dalam suatu tatanan alamiah. Manusia pada situasi ini hidup selaras dengan alam, menjadi bagian di dalamnya namun tidak

mengendalikan. Mereka adalah manusia tetapi belum bisa dikatakan sebagai manusia (Fromm, 2020: 7).

Keterjatuhan manusia ke dunia diawali oleh tindak ketidakpatuhan atau pelanggaran. Ketidakpatuhan membawa Adam dan Hawa pada jati dirinya yakni sebagai makhluk individu yang bebas dan merdeka. Selepas dari Surga, mereka mempunyai kesempatan untuk belajar menjadi manusia penuh. Di dunia, manusia menjadi baru benar-benar menjadi dirinya. Ia bebas menyatakan diri, membuat keputusan dan menanggung resiko dari pilihannya. Tidak hanya itu, manusia pun mulai sadar terhadap dunia dan realitas yang dialaminya. Manusia menjadi manusia justru setelah ia berada di dunia atau dalam hal ini sungguh-sungguh manusiawi (benar-benar memanusia).

Mitos Yunani mengisahkan kemunculan peradaban manusia yang berlatar belakang ketidakpatuhan. Prometheus mencuri api pengetahuan milik dewa dan menjadikannya sebagai dasar bagi tumbuh kembang peradaban manusia. Tidak akan ada sejarah umat manusia tanpa kejahatan Prometheus (Fromm, 2020: 9). Sejarah dunia pun demikian, turut diwarnai oleh ketidaktaatan dan pembangkangan umat manusia. Para filsuf, orang-orang pemberani, para pahlawan dan pejuang bahkan para nabi sekalipun adalah para pembangkang yang membentuk dan menciptakan peradaban baru bagi umat manusia. Mereka melakukan

perlawanan atas apa yang dinilai bertolak belakang atau menyimpang dari nilai-nilai, prinsip dan keyakinan mereka.

Para filsuf menolak mitos, pengetahuan yang dimiliki generasi awal manusia terkait alam semesta. Mereka menolak pengetahuan yang tidak berdasarkan nalar. Para filsuf memilih membangkang atau menolak patuh mengikuti tradisi berpikir masyarakat pada masa itu yang kental dengan corak berpikir mitologis. Mereka dengan penuh semangat menggeser kedudukan mitos melalui konsep berpikir tidak lazim di zamannya yakni dengan memosisikan rasio atau logika sebagai pijakan utama dalam kegiatan berpikir. Keberanian para filsuf melawan tradisi membuahkan hasil berupa bangunan peradaban modern.

Para nabi dan pahlawan menentang otoritas yang memarjinalkan manusia. Orang-orang suci seperti nabi mendudukan kembali otoritas kepada yang seharusnya. Manusia dalam banyak situasi kerap mengambil alih otoritas yang bukan haknya, memosisikan dirinya sebagai tuan atau penguasa dengan cara memperbudak sesamanya. Para nabi dan orang-orang pemberani berdiri tegak dan bersuara lantang menolak praktik-praktik semacam itu. Mereka melawan dan berjuang keras memulihkan derajat dan harkat manusia demi mengembalikan kedudukan manusia sebagai makhluk terhormat dan bermartabat

Ketidakpatuhan yang dilakukan sejumlah orang bukanlah tindakan tanpa alasan. Perlawanan itu dilakukan atas dasar suatu keyakinan yang bulat bahwa manusia semestinya dihormati karena kebebasan dan kemerdekaan yang disandangnya. Keyakinan ini penting karena membawa manusia pada kesadaran untuk berbuat sesuatu atas pilihannya sendiri. Manusia melawan sebab ia sadar bahwa ia tidak perlu menyetujui atau menolak kenyataan yang tidak dialaminya dan berpura-pura mengatakan sesuatu yang bukan berasal dari dirinya. Ia harus menjadi dirinya dan melawan segala sesuatu yang membuat dirinya bukan sebagaimana dirinya.

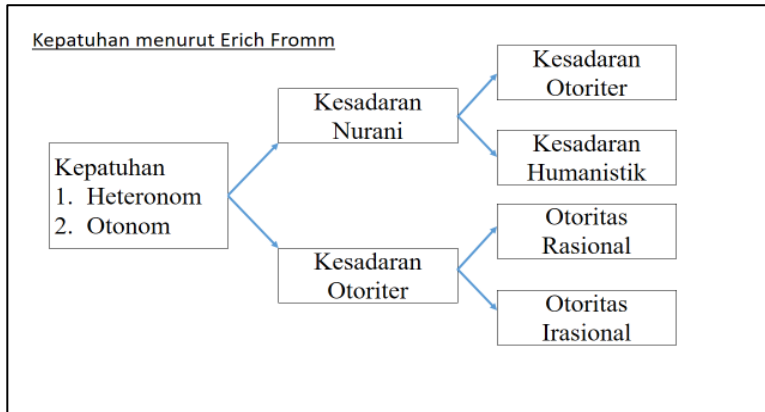
Sejarah manusia pada hakikatnya dipenuhi beragam tindak ketidakpatuhan. Keberanian manusia untuk mengatakan ‘tidak’ atau menolak mengiyakan merupakan kekuatan revolusioner yang mengubah manusia dan kebudayaannya. Tetapi sesampainya manusia pada puncak peradaban, manusia justru terjebak pada kepatuhan baru. Manusia yang begitu percaya diri dengan kekuatan, usaha dan kerja kerasnya akhirnya justru kembali tunduk dan patuh di bawah kendali dan otoritas yang diperjuangkannya sendiri. Sejarah umat manusia merekam dengan baik bagaimana peralihan ketaatan atas otoritas lama bergeser ke otoritas baru. Manusia mulai menubuatkan ketaatan kepada yang lain di luar otoritas lama. Otoritas

baru itu dibangun setelah sebelumnya otoritas lama dengan susah payah dilucuti.

Kepatuhan dan ketidakpatuhan berkelindan. Satu sama lain saling menyelisihi. Kepatuhan kepada yang satu berarti ketidakpatuhan atas yang lain. Begitu pula sebaliknya. Seorang tentara misalnya tidak bisa memilih kepatuhan mana yang semestinya diikuti. Kepatuhan kepada atasan yang memerintahkannya atau kepatuhan kepada nilai-nilai pribadi yang ia anut. Memilih patuh kepada perintah atasan berarti menolak patuh pada kehendak dirinya. Realitas sejatinya dipenuhi kontradiksi, patuh dan tidak patuh, keduanya berdinamika secara dialektis dan sulit disatukan. Ketika keduanya tidak bisa didamaikan maka pilihan patuh ataupun sebaliknya akan tampak saling beroposisi.

Fromm mengambil contoh klasik kisah Antigone oleh Sophokles. Kisah Antigone memberikan suatu gambaran tentang bagaimana kepatuhan dan ketidakpatuhan saling menyelisihi. Kepatuhan seorang Antigone terhadap perintah Kreon, penguasa Thebes yang bertolak belakang dengan kemanusiaan membuatnya melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Sebaliknya, kepatuhan terhadap nilai-nilai kemanusiaan menjadikannya membangkang pada perintah atasan.

Kepatuhan menurut Erich Fromm (2020: 12-13) ditunjukkan melalui gambar berikut,



Kepatuhan dibedakan atas kepatuhan heteronom dan kepatuhan otonom. Kepatuhan heteronom merupakan bentuk penyerahan diri pada penilaian atau kekuasaan orang lain. Sedangkan kepatuhan otonom bermakna afirmasi diri. Perbedaan atas keduanya dijelaskan melalui kualifikasi sebagai berikut;

1. Kesadaran nurani

Kesadaran nurani berkaitan dengan kesadaran otoriter dan kesadaran humanistik. Kesadaran otoriter adalah otoritas lain yang terinternalisasi atau tertanam dalam diri sebagai suatu perintah internal. Sedangkan kesadaran humanistik merupakan kesadaran yang murni manusiawi. Suara yang mengimbau manusia untuk kembali kepada kemanusiaannya. Keduanya merupakan bagian dari kesadaran nurani. Kesadaran otoriter bersumber dari luar manusia dan mengambil

bentuk sebagai rasa cemas dan takut atau rasa senang ketika berhadapan dengan otoritas di luar dirinya, semisal patuh karena perasaan khawatir, takut atau ingin mendapatkan penghargaan dan pujian dari orang lain. Kesadaran otoriter berbeda dengan kesadaran humanistik. Kesadaran humanistik berasal dari suara internal manusia yang memanggil dan menyeru manusia untuk kembali ke dirinya sendiri. Manusia secara intuitif memiliki kemampuan untuk mengenali apa yang manusiawi dari dirinya tanpa harus bergantung pada yang lain. Manusia tahu apa yang baik dan apa yang seharusnya dihindari. Tindakan manusia dalam kesadaran humanistik tidak membutuhkan stimulus. Satu-satunya penentu adalah penilaian dari dirinya sendiri atas tindakannya tersebut yang diperoleh melalui kesadaran intuitif. Misal mengerjakan perintah karena perintah itu baik bagi dirinya. Perintah itu dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa itu memang benar-benar baik, dan bukan atas dasar paksaan, rasa takut atau mengharap sesuatu dari kepatuhannya.

2. Kesadaran otoriter

Otoritas dalam kesadaran otoriter terdiri atas otoritas rasional dan otoritas irasional. Otoritas

rasional direpresentasikan dalam hubungan guru dan murid yang masing-masing bisa saling menerima disebabkan adanya tujuan dan arah yang sama. Sedangkan otoritas irasional ditunjukkan dalam relasi majikan dan budak yang tidak searah atau saling bertolak belakang. Otoritas rasional meletakkan dua otoritas berbeda dalam satu lingkaran yang saling mendukung satu sama lain. Masing-masing bisa menerima kepentingan yang ada di antara mereka. Guru dipatuhi oleh murid dan murid bersedia patuh kepada guru karena keduanya berada dalam nilai dan orientasi yang sama. Sebaliknya dalam otoritas irasional, kepentingan kedua pihak tidak searah atau berada dalam nilai yang berbeda sehingga masing-masing berusaha memaksakan kehendak dan kepentingannya kepada yang lain. Seorang majikan memaksa budaknya untuk patuh. Kepatuhan budak terhadap seorang majikan diperoleh bukan atas dasar keinginan dari budak itu sendiri melainkan karena keterpaksaan. Hubungan ini terus dan sengaja dipertahankan oleh majikan dengan tujuan agar kepatuhan tersebut berlanjut. Di sisi lain, seorang budak berusaha mempertahankan diri atau melepaskan dirinya dari sang majikan

meskipun dalam keadaan terbelenggu. Relasi yang ditunjukkan antar majikan dan budak dalam otoritas irasional bersifat antagonistik dan dominasi. Otoritas rasional mendasarkan dirinya pada pertimbangan universal yang bisa diterima atau disepakati oleh semua pihak. Di dalamnya terdapat hubungan timbal balik dan saling menguntungkan. Sedangkan pada otoritas irasional, pertimbangan cenderung sepihak dan searah sehingga tindakan yang kerap muncul adalah tindak pemaksaan atau dominasi dari satu pihak ke pihak yang lain.

Melalui penjelasan di atas, Erich Fromm ingin mengatakan bahwa kepatuhan seyogyanya diposisikan dalam bingkai kepatuhan otonom dan bukan kepatuhan heteronom. Kepatuhan otonom berasal dari panggilan internal atau suara hati yang menyeru manusia untuk terus memanusia sesuai dengan kodratnya, sebaliknya kepatuhan heteronom berdasarkan pengaruh kekuatan lain di luar manusia. Kepatuhan heteronom hanya akan membuat manusia kehilangan dirinya karena manusia meletakkan pilihannya pada kehendak orang lain.

Berkaitan dengan kepatuhan heteronom dan otonom, Fromm menginginkan manusia memiliki kesadaran humanistik. Kepatuhan dan ketidakpatuhan idealnya berdasarkan pada kesadaran humanistik. Kesadaran humanistik menurut Fromm mencegah

manusia berada dalam pengaruh orang lain. Manusia diharapkan mengambil kendali atas setiap pilihan dan keputusan yang dibuatnya. Fromm juga menghendaki kepatuhan dilaksanakan melalui pertimbangan rasional. Rasionalitas mencegah manusia dari penguasaan orang lain. Dengan bersikap rasional, relasi antar manusia dapat terjalin produktif dan saling menguntungkan.

Erich Fromm dalam tulisannya memberi penegasan atas ketidakpatuhan yang diperlukan dalam rangka membangun jati diri manusia secara penuh. Menurutnya, ketidakpatuhan yang berdasarkan pada kesadaran nurani, akal budi dan nilai-nilai kemanusiaan dapat dianggap sebagai kebajikan atau tindakan revolusioner (Fromm, 2020: 11). Kepatuhan yang mengikuti dorongan napsu dan suasana emosional serta jauh dari nilai-nilai humanistik merupakan keburukan. Manusia tidak boleh dikendalikan oleh perasaannya dan berpaling dari nurani serta akal budinya. Jika ini terjadi maka manusia telah mendegradasi atau mengecilkan dirinya sendiri.

Ketidakpatuhan menurut Fromm bukan sesuatu yang buruk. Demikian pula dengan kepatuhan yang bagi Fromm tidak selalu positif atau baik. Ketidakpatuhan yang diserukan oleh Fromm adalah ketidakpatuhan atas semua yang bertentangan dengan nilai-nilai. Manusia hendaknya menyadari nilai-nilai dasarnya sebagai manusia. Dengan kesadaran ini

manusia mengambil sikap dan tindakan yang selaras nilai-nilai. Kepatuhan pun juga demikian. Bersikap patuh dan tunduk semestinya berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan bukan karena rasa takut atau merasa inferior dari yang lain.

Kepatuhan menurut Fromm menjamin perasaan aman (*secure*). Kepatuhan membuat manusia tenggelam dalam kekuasaan dan menjadikan manusia semakin kuat karena solidaritas. Kekuasaan mengawasi dan mengendalikan manusia untuk tetap berada pada jalur yang linear dan paralel dengan kekuasaan. Kekuasaan menarik manusia untuk terikat dan menjadi bagian di dalamnya. Kekuasaan memaklumkan apapun sepanjang manusia berada dalam kekuasaan. Manusia menjadi besar karena dukungan kekuasaan. Maka manusia memilih patuh dan ambil bagian dalam kekuasaan.

Dorongan rasa takut kerap membuat manusia mengambil pilihan untuk patuh. Ketakutan mendasar pada diri manusia adalah kehilangan kenyamanan atau rasa aman dari dirinya. Demi menjaga keamanan dirinya, manusia mulai menyandarkan dirinya pada kekuatan yang lain sebagai sumber atau pemberi rasa aman. Usaha manusia untuk menghimpun diri dalam suatu kekuatan bersama juga merupakan cara pertahanan manusia meski dengan begitu manusia tidak

hanya menyerahkan dirinya pada kekuatan bersama namun juga tunduk dan patuh pada kekuatan tersebut.

Keberanian manusia untuk mengatakan tidak atau keluar dari belenggu kekuasaan dan menjadi tidak patuh bisa terjadi hanya jika manusia telah menjadi individu yang matang dan sanggup berpikir untuk dirinya sendiri. Namun demikian, keberanian manusia untuk tidak patuh bukan perkara mudah karena sejak awal kepatuhan telah ditahbiskan sebagai kebajikan demi menutupi ambisi seseorang atau segelintir orang.

Kepatuhan juga kerap dihubungkan dengan kepentingan teologis. Ia dilekatkan dengan pada kualitas yang Maha. Sehingga sukar untuk melepaskan diri dan bersikap tidak patuh. Otoritas suci memaklumkan dirinya sebagai kekuasaan yang harus dipatuhi. Pembangkangan atau pelanggaran adalah dosa dan kejahatan. Para rahib dan pemuka agama menggunakan otoritas ini untuk memanipulasi kepatuhan manusia. Menentang mereka sama halnya menentang otoritas suci. Situasi ini melahirkan pembangkangan umat awam kepada kaum agamawan. Kelahiran Protestanisme erat kaitannya dengan situasi di atas. Kritik yang diajukan umat pada masa itu terhadap praktik keagamaan mengubah wajah kekristenan hingga hari ini.

Kepatuhan yang identik dengan ketaatan pada kekuasaan spiritual di abad pertengahan mengalami

pergeseran di era modern. Pasca abad Pertengahan, manusia beralih pada kekuasaan yang anonim dan tak kasat mata. Abad 20 ditandai dengan pelbagai perubahan signifikan dalam sistem birokrasi dan fungsi terkomputerisasi yang menjadikan manusia patuh secara sukarela mengikuti otoritas rasional atau yang dianggapnya masuk akal.

Peradaban modern sebagai kelanjutan era Pertengahan melahirkan banyak terobosan terutama dalam hal sains dan teknologi. Rasionalitas yang menggiring manusia ke alam pencerahan memaksa manusia patuh terhadap sistem berpikir yang mengentaskannya dari keterkungkungan teologis. Supremasi positivisme logis menggeser metafisika dan menjadikan kehidupan kering karena semua serba materi. Manusia modern dipaksa tunduk mengikuti model berpikir yang memosisikan manusia tidak lebih sebagai benda.

Pendidikan abad 20 mensupervisi peserta didik untuk patuh mengikuti sistem yang ditanamkan. Ia diberikan kesempatan untuk berkembang namun masih dalam sistem yang ditentukan. Di rumah, anak-anak diasuh untuk menjadi makhluk organisasi. Orang tua rela mengorbankan dirinya hanya agar anak-anak mereka patuh pada sistem yang ada dan menjadi bagian di dalamnya. Jargon-jargon ideologis seperti kedaulatan negara, martabat negara atau kedigdayaan militer

didengarkan dan kepada mereka kepatuhan diarahkan tanpa syarat dan disadari. Fromm (2020: 19) memberi catatan penting terkait manusia organisasi sebagai berikut,

manusia organisasi kehilangan kapasitas dan kemampuan untuk tidak patuh karena ia sebenarnya sudah tidak menyadari lagi bahwa selama ini ia sudah bersikap patuh. Pada titik ini kemampuan untuk meragukan, mempertanyakan, mengkritik dan tidak patuh mungkin satu-satunya tonggak penentu antara masa depan umat manusia dan akhir peradaban.

Ketidakpatuhan menurut Fromm pada hakikatnya merupakan tindakan afirmasi terhadap akal budi, nalar dan kehendak. Ketidakpatuhan bukan suatu pembangkangan atau sikap menentang melainkan suatu penegasan atas apa yang ia lihat, dengar dan rasakan sebagai manusia. Manusia cukup membuka mata lebar-lebar, mendengar dengan seksama, menyadari penuh dan bertanggung jawab demi mencerahkan kehidupan dan peradaban manusia.

BAB IV

MENILIK KETIDAKPATUHAN PUBLIK DI MASA PANDEMI MENURUT ERICH FROMM

A. Tipologi Ketidakpatuhan Publik di Masa Pandemi

Juru bicara Satuan Tugas Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan pencegahan Covid-19 mengalami penurunan (Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Harus Ditingkatkan, www.covid19.go.id, diakses 11 Maret 2021). Penurunan ini menyebabkan *positivity rate* Covid-19 di Indonesia memburuk. Sebelumnya, Achmad Yuriantoro juga menyebutkan bahwa penambahan kasus Covid-19 menunjukkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan belum optimal (Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan belum Optimal, www.kemkes.go.id, diakses 20 Maret 2021).

Dicky Rachmawan (Melampaui "Ketidakpatuhan Masyarakat", Kebingungan dan Keacuhan dalam Kejenuhan Perdebatan yang Tiada Henti www.pmb.lipi.go.id, diakses 5 Februari 2021) melalui perspektif Macionis mencoba melihat problem

ketidakpatuhan publik secara sosiologis. Ada tiga cara untuk menjelaskan permasalahan sosial;

1. Struktur fungsional, munculnya kebijakan yang memengaruhi perilaku masyarakat.
2. Pandangan konflik, masyarakat sebagai arena ketimpangan antar satu kelompok dengan kelompok lain yang akhirnya memunculkan pertentangan.
3. Interaksionis simbolis, masyarakat dibentuk oleh interaksi dari individu-individu dalam masyarakat.

Dalam kasus Covid-19, kebijakan pemerintah dinilai tidak jelas dan menimbulkan multi interpretasi semisal relaksasi PSBB atau berdamai dengan Corona. Istilah-istilah tersebut membuat publik bingung karena siapapun mengetahui bahwa corona merupakan ancaman dan publik diminta berdamai dengan ancaman. Kesimpangsiuran informasi yang disampaikan pemerintah menyebabkan keraguan dan kegamangan publik dalam mensikapi Covid-19. Harjudin (2020: 90) menegaskan bahwa pemerintah mengalami krisis legitimasi terkait penanganan Covid-19. Krisis ini berujung pada resistensi publik atas kebijakan pemerintah dalam mengatasi Covid-19.

Ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan dipicu oleh minimnya informasi yang diterima oleh masyarakat terutama masyarakat dengan

tingkat intelektualitas dan ekonomi rendah. Namun situasi ini dinilai tidak tepat. Epidemiolog dari Universitas Padjajaran, Deni Kurniadi Sunjaya, menyebut penyebab terus meningkatnya penyebaran virus corona bukan karena masyarakat menengah ke bawah yang tidak patuh, melainkan akibat dari kesalahan tafsir dan bentuk pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah (Lumbanrau, Covid-19 Indonesia terus naik: Orang yang tak taat protokol makin banyak karena masyarakat menengah tak paham?, www.bbc.com, diakses 5 Maret 2021).

Sari (2021: 84) mengungkapkan bahwa ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan disebabkan oleh ketidakpahaman masyarakat akan dampak dan resiko Covid-19. Publik kurang memahami bahaya dan manfaat penerapan protokol kesehatan. Pemerintah dalam sejumlah kasus dinilai lemah dalam menyosialisasikan pencegahan dan penanganan Covid-19. Pemerintah tidak melakukan diseminasi tepat sasaran sehingga informasi yang diterima publik tidak lengkap. Masyarakat di beberapa daerah merasa tidak menerima informasi memadai perihal Covid-19. Akibatnya, masyarakat menolak untuk patuh karena menganggap bahwa Covid-19 bukan merupakan persoalan serius yang perlu disikapi dengan penuh kehati-hatian.

Kasus rumah sakit yang mengcovidkan pasien demi meraup keuntungan turut memperkuat resistensi publik kepada pemerintah. Situasi ini tentu saja memperhadapkan publik dengan pihak rumah sakit dan memunculkan pertentangan di masyarakat. Moeldoko, Kepala staf kepresidenen bahkan memberikan peringatan keras kepada pihak rumah sakit untuk tidak mengcovidkan pasien (Moeldoko: Rumah Sakit Jangan Semua pasien Dicovidkan, m.merdeka.com, diakses 5 Maret 2021). Isu terkait itikad buruk rumah sakit terhadap pasien turut berimbas pada meningkatnya *distrust* atau ketidakpercayaan publik atas kinerja rumah sakit.

Sebelumnya, berdasarkan data dari Satuan Tugas Pencegahan Covid-19 diperoleh informasi bahwa kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan dinilai membaik. Kepatuhan masyarakat dalam menjalani protokol kesehatan 3M selama pandemi yakni kewajiban memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, diklaim sudah mulai disiplin. Sudah lebih 80 persen masyarakat mematuhi protokol kesehatan dan adaptasi dengan kebiasaan baru (Makin Patuh 3 m, 84 Persen Masyarakat Sudah Disiplin Pakai Masker, www.jawapos.com, diakses 10 Februari 2021). Survei Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, 92 persen masyarakat, diwakili oleh responden, patuh menggunakan masker sebagai salah

satu protokol kesehatan. Namun, jenis protokol kesehatan relatif rendah dipatuhi masyarakat, yakni terkait *physical distancing* atau jaga jarak (Survei BPS: Warga Patuh Pakai Masket, Tapi Abai jaga Jarak, www.republika.id, diakses 2 Februari 2021).

Namun pasca libur panjang diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah positif Covid-19. Ketidaksiapan pemerintah dalam membaca situasi mengakibatkan tren penularan naik secara signifikan. Kenaikan angka positif Covid-19 juga dipicu oleh tarik ulur kebijakan pemerintah terkait pelarangan mudik. Pemerintah dalam situasi ini dituding tidak tegas dalam mengambil maupun mengeksekusi kebijakan Covid-19.

Pada penghujung tahun 2020, Covid-19 kembali meningkat pesat. Problemnya sama yakni publik bersikap acuh tak acuh atau kurang memedulikan bahaya penularan Covid-19 dengan tidak menerapkan protokol kesehatan secara tertib. Sikap acuh tak acuh dilatarbelakangi kejenuhan warga dan ketiadaan opsi alternatif atas kebijakan yang diterapkan pemerintah. Publik dihadapkan pada situasi sulit terutama berkaitan dengan kepentingan ekonomi. Kebijakan pembatasan sosial dan wilayah yang cukup lama membatasi ruang gerak masyarakat dalam berkegiatan ekonomi. Tidak ada akses ekonomi yang dimiliki warga selain bantuan yang diberikan pemerintah. Situasi ini mendorong dan memaksa publik melanggar protokol kesehatan.

Beberapa kasus pelanggaran protokol kesehatan memperoleh perlakuan hukum yang berbeda. Pemerintah dianggap tidak konsisten dalam menerapkan kebijakan sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan. Publik menilai pemerintah memberlakukan tebang pilih dalam penerapan sanksi bagi para pelanggar. Tindakan tebang pilih yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berdampak pada ketidakpercayaan publik terhadap kebijakan sanksi tersebut.

Afrianti dan Rahmiati (2020: 113) mengurai sejumlah faktor yang memengaruhi kepatuhan publik terhadap protokol kesehatan. Faktor-faktor tersebut antara lain pengetahuan terhadap protokol kesehatan, sikap terhadap protokol kesehatan, dan motivasi masyarakat. Ketiga faktor ini menurut mereka berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan publik. Ghiffari, dkk, (2021: 450) menyatakan bahwa ketidakpatuhan publik disebabkan oleh faktor-faktor seperti pengetahuan, kenyamanan, ketersediaan sarana, akses informasi, dan sistem pengawasan.

Ketidakpatuhan publik terhadap kebijakan penanganan Covid-19 secara umum dikategorikan ke dalam dua faktor berikut;

1. Faktor Internal.

Ketidakpatuhan publik terhadap kebijakan Covid-19 bersumber dari internal masyarakat.

Faktor internal meliputi tingkat intelektualitas, keyakinan atau kepercayaan dan persepsi pribadi. Faktor-faktor ini menyebabkan publik enggan atau menolak mematuhi protokol kesehatan. Tingkat intelektualitas berhubungan dengan pemahaman publik atas informasi Covid-19. Ketidakpahaman publik terkait Covid-19 bisa diakibatkan oleh ketidaktepatan informasi yang disampaikan pemangku kebijakan atau publik memang tidak mempunyai kemampuan yang memadai untuk menangkap penjelasan Covid-19 secara tepat. Keyakinan atau kepercayaan berkaitan dengan sikap tidak mempercayai Covid-19 sebagai realitas. Masyarakat mempunyai kepercayaan bahwa Covid-19 bisa diatasi dengan pendekatan tradisi seperti yang dicontohkan masyarakat Tulungagung melalui Tetek Melek sebagai pengusir bala. *Tetek Melek is a traditional talisman believe to repel outbreaks of disease and protect families* (Tulungagung villagers stand fast against Covid-19 with spiritual boost from ‘tetek melek’, thejakartapost.com, diakses 20 Maret 2021). Keyakinan dan kepercayaan melahirkan tindakan yang irasional. Alih-alih mematuhi protokol kesehatan, masyarakat justru percaya dengan-hal-hal yang metafisis. Persepsi

pribadi menyangkut apa yang dipersepsikan masyarakat terhadap Covid-19. Publik mempersepsikan sendiri realitas Covid-19 dan mengambil kesimpulan yang tidak sejalan dengan upaya penanganan Covid-19. Publik mempersepsikan Covid-19 sebagai fenomena manipulatif atau hasil rekayasa. Dalam kesempatan yang lain, persepsi pribadi bisa berupa perbedaan pandangan atau tampil dalam bentuk sentimen anti atau perasaan tidak suka yang berimplikasi pada sikap tidak peduli dan enggan mengindahkan protokol kesehatan.

2. Faktor Eksternal.

Faktor eksternal bersumber dari luar masyarakat atau bisa dikatakan berasal dari sisi pemerintah. Faktor eksternal bermuara pada *distrust* atau ketidakpercayaan publik kepada pemerintah. Persoalan-persoalan terkait ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah antara lain sebagai berikut;

- a. Tarik ulur kebijakan dan konsistensi penerapan kebijakan.
- b. Kebijakan yang tidak tepat sasaran.
- c. Sosialisasi dan diseminasi informasi Covid-19
- d. Politik pencitraan.
- e. Korupsi dan kejahatan dana bantuan.

f. Hukum dan ketidakadilan.

Akumulasi faktor eksternal berdampak pada pembangkangan publik terhadap protokol kesehatan. Publik jenuh dan merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah. Situasi ini kemudian disikapi publik dengan bersikap masa bodoh atau tidak peduli dalam menerapkan protokol kesehatan.

Kedua faktor di atas baik internal maupun eksternal sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri. Keduanya saling memengaruhi secara interaktif. Baik publik maupun pemerintah, keduanya dihadapkan pada musuh yang sama. Sehingga ketidakpatuhan atau sebaliknya kepatuhan bisa dikatakan merupakan reaksi atas dinamika yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan pada penjelasan terkait faktor-faktor yang menyebabkan publik menolak patuh dalam menerapkan protokol kesehatan maka ketidakpatuhan publik terhadap protokol kesehatan dapat diklasifikasikan sebagai ketidakpatuhan internal dan ketidakpatuhan eksternal. Ketidakpatuhan internal merujuk pada penyebab internal sedangkan ketidakpatuhan eksternal merunut pada faktor eksternal.

Dari paparan di atas juga dapat disimpulkan bahwa ketidakpatuhan publik terhadap kebijakan pemerintah bukan sikap tanpa alasan. Pilihan untuk tidak patuh atau menolak mengikuti kebijakan pemerintah

didasarkan pada pertimbangan yang logis. Ketidakpatuhan publik terhadap protokol kesehatan dalam situasi ini merupakan pilihan yang tidak bisa dielakkan mengingat tidak ada opsi yang lebih baik sehingga publik memilih untuk tidak mengindahkan protokol kesehatan.

B. Telaah Ketidakpatuhan Publik di Masa Pandemi menurut Erich Fromm

Pandemi Covid-19 memberi dampak yang signifikan pada sendi-sendi kehidupan masyarakat. Seluruh aspek kehidupan manusia tanpa terkecuali terkena imbas langsung dari pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 menyita perhatian semua pihak karena pengaruh yang ditimbulkannya sedemikian luar biasa. Tidak hanya aspek kesehatan masyarakat namun juga aspek ekonomi, sosial dan budaya. Pandemi mengubah wajah masyarakat Indonesia dan negara-negara terdampak Covid-19.

Sejak penemuan kasus pertama Covid-19 pada bulan Maret 2020, pemerintah Indonesia berupaya mencegah dan menanggulangi pandemi Covid-19. Namun upaya ini belum membuahkan hasil yang memuaskan mengingat grafik penularan Covid-19 di Indonesia bergerak fluktuatif. Sejumlah kebijakan dicanangkan pemerintah guna mengatasi pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut bersifat multi sektor

dengan fokus utama pada bidang kesehatan. Kebijakan penanganan pandemi Covid-19 meliputi kebijakan pembatasan wilayah, penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi.

Penerapan kebijakan terkait pandemi Covid-19 dinilai banyak kalangan belum berjalan optimal. Problem utamanya terletak pada rendahnya komitmen pemerintah dan masyarakat. Kebijakan penanganan Covid-19 memerlukan kerjasama lintas komponen. Kerjasama ini penting karena sangat menentukan tingkat keberhasilan penanggulangan pandemi Covid-19. Pengamat menilai masyarakat cenderung abai dan tidak disiplin dalam penerapan protokol kesehatan. Ketidakpatuhan publik dalam menaati kebijakan pemerintah berimplikasi pada peningkatan kasus penularan Covid-19. Harmawati dan Yanti (2021: 94) menyatakan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan 3 M masih belum memuaskan. Grafik penularan Covid-19 cenderung menguat terutama pasca libur.

Kepatuhan masyarakat atau warga terhadap kebijakan pemerintah merupakan kunci utama pencegahan Covid-19 (Kepatuhan Protokol Kesehatan Terbukti Menekan Penularan Covid-19, m.merdeka.com, diakses 8 Maret 2021). Namun praktik di lapangan menunjukkan bahwa terdapat banyak kasus terkait ketidakdisiplinan warga dalam menjalankan

kebijakan pemerintah. Ketidakdisiplinan dan keengganan warga untuk patuh ditemukan hampir di sebagian besar wilayah Indonesia. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan mengingat setiap orang berpotensi sebagai *carrier* (pembawa) Covid-19. Beberapa wilayah bahkan memperoleh predikat sebagai daerah dengan kewaspadaan tingkat tinggi atau darurat Covid-19.

Covid-19 menuntut semua pihak untuk *aware* atau peduli dengan situasi pandemi. Pandemi Covid-19 bukan pandemi biasa yang dengan mudah diatasi melalui tindakan dan perawatan medis biasa. Para ilmuwan menyebut Covid-19 bukan lagi pandemi melainkan sindemi (Ilmuwan sebut Covid-19 bukan lagi pandemi, melainkan sindemi, www.kontan.co.id, diakses 5 Maret 2020) Tingkat penularan dan transmisi Covid-19 sangat cepat. Setiap orang dengan kondisi imun rendah rentan terpapar virus ini terlebih mereka yang berusia lanjut (lansia) dan berpenyakit penyerta. Kesadaran dan kepedulian bersama untuk saling menjaga satu sama lain melalui kedisiplinan ketat terhadap protokol kesehatan akan sangat membantu setiap upaya pemerintah dalam mengatasi Covid-19.

Publik perlu menyadari dengan baik bahwa virus ini terkategori sebagai virus berbahaya dengan tingkat penularan yang sangat tinggi. Hingga saat ini belum ditemukan obat dan terapi yang tepat guna mengatasi

Covid-19 (Gallagher, Covid-19: Mengapa virus corona sangat mematikan, www.bbc.com, diakses 3 Maret 2021). Kebijakan pemerintah melalui protokol kesehatan merupakan langkah preventif yang sejauh ini dinilai efektif dalam mencegah persebaran Covid-19. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perantara penularan adalah Partikel cair yang keluar dari saluran hidung atau mulut seseorang saat berbicara, bersin atau batuk (*droplet*). Penularan Covid-19 dari manusia ke manusia ini diantisipasi pemerintah melalui protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang dikenal dengan 3 M, mengenakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak merupakan tindakan antisipatif yang diharapkan mampu mengurangi tingkat penularan Covid-19.

Resiko terburuk yang dihadapi oleh seseorang yang terpapar Covid-19 adalah kematian. Covid-19 diperkirakan menyebabkan dua persen laju kematian dibandingkan flu Spanyol (Davis, 2021: 14). Kematian akibat Covid-19 menyasar tidak hanya kepada orang-orang berusia lanjut namun juga mereka yang berusia muda. Kendati saat ini kematian lebih banyak dialami oleh penderita berusia lanjut namun perlu diingat bahwa penularan Covid-19 bisa berasal dari orang-orang muda. Kewaspadaan tingkat tinggi justru ditujukan kepada anak-anak muda yang positif Covid-19 namun tidak bergejala atau teridentifikasi. Mereka

adalah *carrier* yang berpotensi besar menularkan Covid-19 kepada orang-orang di lingkungan terdekatnya.

Resiko kematian yang begitu tinggi akibat Covid-19 memaksa pemerintah untuk mengambil tindakan yang sekiranya diperlukan dalam usaha menahan laju penularan Covid-19. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah adalah menerbitkan kebijakan *reward and punishment*. Kebijakan ini berkaitan erat dengan upaya pemerintah meningkatkan disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Sanksi teguran hingga administratif diberikan kepada pelanggar yang terbukti melakukan pelanggaran atas protokol kesehatan.

Upaya pemberian sanksi dinilai tidak efektif dalam mengurangi penyebaran Covid-19. Hal ini ditandai dengan semakin meluasnya ketidakpatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Pelaksanaan kebijakan *reward and punishment* kerap dirasakan publik berat sebelah atau tidak adil. Pemerintah dianggap tebang pilih dalam menerapkan kebijakan *reward and punishment*. Situasi ini pada akhirnya berujung pada sikap permisif publik atas kebijakan pemerintah. Publik tidak peduli bahkan tidak takut dengan ancaman sanksi bagi pelanggaran protokol kesehatan.

Erich Fromm dalam *On Disobedience and The Other Essays* menjelaskan tentang bagaimana manusia

seharusnya menjalani kehidupannya secara manusiawi atau sungguh-sungguh memanusiakan sesuai dengan kodratnya. Manusia memiliki pengetahuan apa yang manusiawi dan tidak manusiawi, apa yang kondusif dan destruktif bagi kehidupan (Fromm, 2020: 13). Praktik kehidupan yang bertolak belakang dan tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan mesti ditepis atau dihindari. Manusia sepatutnya tidak melakukan tindakan dan perbuatan yang menyalahi kodratnya sebagai manusia yang bebas merdeka. Manusia dituntut untuk berpikir dan bertindak manusiawi. Dengan cara ini, manusia bisa benar-benar menjadi dirinya secara utuh dan penuh.

Pada bagian awal tulisannya tentang ketidakpatuhan, Fromm mulai dengan sebuah penegasan bahwa ketidakpatuhan bukanlah kejahatan seperti yang selama ini dikonotasikan oleh masyarakat dan kebudayaan pada umumnya. Fromm (2020: 11) menyatakan "saya tidak bermaksud mengatakan bahwa semua sikap dan tindakan kepatuhan adalah kebajikan dan semua sikap kepatuhan adalah keburukan". Ketidakpatuhan tidak selalu buruk atau negatif. Di balik ketidakpatuhan terdapat sesuatu yang diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Ketidakpatuhan dalam banyak kesempatan dilakukan dengan sengaja demi sebuah alasan yang dibenarkan secara moral. Alasan ini

menjadikan pelanggaran atau pembangkangan ditoleransi dan dianggap sebagai hal yang positif.

Sebaliknya, kepatuhan yang dianggap positif dan dinilai sebagai kebijakan justru menyimpan hal-hal kontradiktif. Di balik kepatuhan ditemukan dominasi dan tindakan manipulatif. Kepatuhan dilakukan bukan atas dasar kerelaan (*voluntary*) melainkan keterpaksaan. Kepatuhan bukan pula didasarkan pada kesadaran penuh bahwa tindakan itu benar-benar baik dan masuk akal. Manusia patuh karena kesadarannya tertutup atau termanipulasi oleh nilai-nilai yang sengaja ditanamkan seperti perasaan cemas, takut kepada orang lain atau termotivasi untuk menyenangkan dan memberikan kepuasan kepada orang lain.

Ketidakpatuhan publik terhadap protokol kesehatan ataupun kebijakan lain terkait penanganan Covid-19 perlu ditilik secara komprehensif. Dalam kebijakan pemerintah, pelanggaran terhadap protokol kesehatan berimplikasi pada perlakuan hukum tertentu. Pemerintah memberikan sanksi hukum kepada mereka yang terbukti menolak, mengabaikan dan menentang kebijakan pemerintah. Hukumannya bervariasi dari teguran hingga sanksi administratif. Pemerintah juga memberikan *reward* atau penghargaan kepada daerah yang dinilai berhasil mengurangi angka penularan Covid-19. *Reward* dan *punishment* diterapkan

pemerintah dalam rangka menekan penyebaran Covid-19.

Fromm menolak kepatuhan yang dipaksakan atau berdasarkan rasa takut. Kepatuhan menurut Fromm semestinya bersumber dari kesadaran bahwa ia patuh karena ia tahu atau mempunyai alasan yang bisa dibenarkan secara moral. Memaksa seseorang untuk patuh dengan menebar rasa takut menunjukkan sikap otoriter. Fromm membagi kepatuhan ke dalam dua kategori yakni kepatuhan heteronom dan kepatuhan otonom. Kepatuhan yang disebabkan oleh perasaan takut dikategorikan sebagai kepatuhan heteronom. Kepatuhan jenis ini berada di luar kendali manusia, dengan kata lain mengandalkan atau bersumber dari kekuatan lain di luar diri manusia. Manusia mematuhi aturan karena khawatir atau takut mendapatkan sanksi jika melanggar. Sebaliknya kepatuhan yang didasarkan pada kesadaran bahwa tindakan patuh itu adalah baik bagi dirinya maka kepatuhan ini dikategorikan sebagai kepatuhan otonom. Kepatuhan otonom menghendaki manusia mendasarkan diri pada pertimbangan yang bersumber dari dirinya sendiri. Dengan kata lain, manusia sanggup mempertanggungjawabkan keputusan atau pilihannya karena dirinya memiliki cukup alasan yang logis dan tidak bertentangan dengan nurani.

Pertanyaan yang perlu diajukan terkait ketidakpatuhan publik terhadap kebijakan pemerintah

adalah apakah ketidakpatuhan itu didasarkan pada alasan yang bisa dibenarkan atau sebaliknya. Pandemi memengaruhi banyak aspek kehidupan manusia. Keseharian hidup manusia berubah semenjak pandemi. Kebijakan demi kebijakan dikeluarkan pemerintah guna mengatasi Covid-19. Beberapa kebijakan yang diterbitkan pemerintah antara lain berkaitan dengan pembatasan sosial (*social distancing*). Kebijakan ini berefek luar biasa bagi masyarakat baik secara sosial maupun ekonomi. Aktivitas manusia dibatasi demikian pula dengan kegiatan usaha.

Ketidakpatuhan publik terhadap kebijakan pemerintah tidak selalu berdasar pertimbangan ekonomi. Menimbang beragam faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan pelanggaran maka menjadi tidak mudah untuk mengkategorikan kepatuhan dan ketidakpatuhan publik terhadap kebijakan pemerintah menurut perspektif Erich Fromm. Kesulitan yang dihadapi adalah tindak kepatuhan dan ketidakpatuhan publik didasarkan pada sejumlah alasan. Alasan ini menjadi penting dalam analisis Fromm untuk menentukan kualitas dari tindakan tersebut. Lebih jauh, apakah tindakan itu bisa diterima atau sebaliknya.

Di masa awal pandemi, kurang lebih tiga bulan pertama, publik terlihat menaati protokol kesehatan. Kota-kota tampak sepi. Pusat-pusat perbelanjaan,

hiburan dan lokasi wisata tutup. Namun menginjak beberapa bulan berikutnya, publik mulai mengeluhkan kebijakan pembatasan sosial. Pembatasan kegiatan ekonomi yang dilakukan pemerintah melalui pembatasan sosial berdampak pada pendapatan masyarakat. Masyarakat pun dihadapkan pada situasi yang sulit. Berdiam di rumah atau keluar rumah dengan resiko terpapar Covid-19. Sebagian masyarakat terpaksa memilih keluar rumah karena jika tidak mereka akan kesulitan menafkahi keluarga. Mereka pada akhirnya menolak untuk patuh dan tidak mengindahkan protokol kesehatan karena pertimbangan mendasar yakni mempertahankan dan melanjutkan kehidupan.

Publik dalam situasi ini dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah yakni terpapar Covid-19 atau mati kelaparan. Keduanya berkaitan dengan hal yang fundamental dalam hidup manusia. Bertahan hidup adalah alasan mendasar dan tidak bisa tidak harus dipenuhi manusia. Ketidakpatuhan publik terhadap kebijakan pemerintah disebabkan karena pemerintah tidak memberikan opsi lain berupa jaminan ekonomi di balik kebijakan yang diterbitkannya. Mereka yang terdampak akibat pembatasan sosial tidak mempunyai alternatif selain harus melanggar kebijakan pemerintah.

Ketidakpatuhan publik atas kebijakan pembatasan sosial dikategorikan sebagai kepatuhan otonom. Publik

menolak kebijakan tersebut karena memilih patuh pada pertimbangan otonom dari dirinya. Ia harus keluar rumah demi kepentingan ekonomi. Resiko terpapar Covid-19 tidak bisa dielakkan. Publik beralasan bahwa Covid-19 masih memungkinkan untuk dihindari dengan antisipasi yang tepat. Namun tidak ada yang bisa membantu menggantikan tanggung jawab menafkahi keluarga. Pada konteks ini pelanggaran atas kebijakan pemerintah tidak bisa dinilai sebagai hal yang negatif karena pertimbangan yang digunakan sangat mendasar.

Kepatuhan otonom dan heteronom sebenarnya dapat ditilik lebih mendalam dengan memosisikan sudut pandang secara tepat. Publik memilih untuk mematuhi kebijakan pemerintah karena memahami dengan baik resiko Covid-19. Publik menyadari bahwa Covid-19 berbahaya sehingga perlu dihindari salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Kesadaran tentang bahaya Covid-19 mengantarkannya pada sikap patuh terhadap protokol kesehatan. Kepatuhan dalam konteks ini menunjukkan kepatuhan otonom. Publik membuat pilihan dengan berdasarkan pada pertimbangan otonom dirinya dengan berani mengatakan ‘tidak’ pada Covid-19.

Situasi di atas juga menunjukkan bentuk kepatuhan heteronom dalam hal kepatuhan publik terhadap protokol kesehatan disebabkan oleh rasa khawatir atau takut terpapar Covid-19. Unsur heteronom ada pada

Covid-19. Menolak patuh terhadap kebijakan berarti memasrahkan diri pada Covid-19. Berkaitan dengan kebijakan Covid-19, pemerintah juga dapat diposisikan sebagai unsur heteronom. Kepatuhan karena takut akan sanksi pelanggaran dan bukan akan dasar kesadaran diri dapat digolongkan sebagai kepatuhan heteronom.

Ketidakpatuhan juga tampak dalam situasi yang lain. Mematuhi protokol kesehatan sama artinya menolak patuh pada keinginan diri sendiri. Mengingat dalam situasi pandemi Covid-19, masyarakat cenderung membatasi diri dan memilih untuk berdiam diri atau tinggal di rumah. Publik harus meredam keinginannya beraktivitas di luar demi patuh pada kebijakan protokol kesehatan dan terhindar dari paparan Covid-19. Ketidakpatuhan pada situasi ini termasuk dalam lingkup ketidakpatuhan otonom.

Sebaliknya ketidakpatuhan heteronom tampil dalam kondisi dimana ketidakpatuhan itu disebabkan oleh sesuatu di luar diri manusia. Publik memutuskan untuk patuh karena ingin memutus mata rantai Covid-19. Publik tidak ingin terpedaya oleh Covid-19 sehingga memilih untuk menolak patuh dan tunduk dalam belenggu Covid-19. Unsur heteronom dalam kasus ini adalah Covid-19.

Publik mendasarkan diri pada sejumlah alasan atas ketidakpatuhannya terhadap kebijakan pemerintah. Sebagian besar masyarakat umumnya mengetahui

dampak atau resiko yang dihadapi seseorang ketika terpapar Covid-19. Kebijakan pemerintah terkait protokol kesehatan tidak sepenuhnya salah atau keliru. Para ahli dinilai telah memberikan saran yang tepat dalam upaya mencegah penularan Covid-19 melalui protokol kesehatan 3 M. Ketidakpatuhan publik dalam kondisi ini lebih merupakan perlawanan publik kepada pemerintah akibat inkonsisten kebijakan dan penerapannya di lapangan.

Publik lelah dan jenuh menghadapi pandemi Covid-19 yang semakin lama tidak terkendali. Kebijakan pemerintah dirasakan belum membuahkan hasil yang maksimal. Ketidaktepatan pemerintah dalam menetapkan prioritas berimbas pada kebijakan pemerintah. Publik pun akhirnya gamang dalam bersikap di tengah pandemi Covid-19. Kegamangan publik dalam bersikap menimbulkan keragu-raguan yang berefek pada sikap permisif dan apatis.

Menilik latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong publik tidak patuh terhadap protokol kesehatan maka ketidakpatuhan publik dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Ketidakpatuhan sebab internal.

Faktor-faktor internal penyebab ketidakpatuhan antara lain tingkat pengetahuan atau intelektualitas, keyakinan dan kepercayaan serta persepsi pribadi. Fromm memberikan

pertimbangan tegas terkait apakah ketidakpatuhan bisa dibenarkan atau tidak. Pertimbangan itu terletak dalam argumen yang mendasari pilihan sikap untuk menolak patuh atau sebaliknya. Publik beranggapan bahwa Covid-19 bukan penyakit yang membahayakan, Covid-19 adalah rekayasa atau Covid-19 berkaitan dengan hal-hal gaib dan sebagainya. Anggapan ini tentu saja keliru. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Covid-19 adalah penyakit yang berbahaya dengan resiko kematian yang luar biasa. Kenyataan ini tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan di seluruh negara terpajan Covid-19. Siapapun tidak bisa menutup mata atau menyangkal (*denial*) atas kenyataan yang terjadi. Penyangkalan dalam situasi ini menjadi tidak logis mengingat begitu banyak fakta kongkret yang dapat diamati terkait Covid-19. Menimbang alasan yang dikemukakan publik terkait hal ini maka ketidakpatuhan tidak bisa diterima atau dengan kata lain tidak pada tempatnya.

2. Ketidakpatuhan sebab eksternal.

Faktor eksternal mengurai alasan atau sebab ketidakpatuhan publik yang bersumber dari luar masyarakat. Ada sejumlah motif mengapa publik enggan patuh terhadap protokol

kesehatan. Problem terbesar yang tampak dari faktor eksternal adalah distrust atau ketidakpercayaan publik kepada pemerintah selaku pihak eksternal. Penyebab menipisnya kepercayaan publik terhadap pemerintah di antaranya sebagai berikut;

- a. Pemerintah dinilai tidak tegas dan konsisten dalam mengeluarkan kebijakan termasuk dalam penerapannya di lapangan.
- b. Kebijakan pemerintah dinilai tidak adil dan merata.
- c. Sosialisasi dan diseminasi informasi Covid-19 yang tidak tepat. Informasi tidak valid, cenderung berubah-ubah dan tumpang tindih.
- d. Kebijakan penanganan Covid-19 bersifat politis dan ditujukan untuk proyek pencitraan.
- e. Tindak kejahatan dan korupsi dana bantuan Covid-19.
- f. Ketidakadilan atau perlakuan hukum berbeda bagi pelanggar protokol kesehatan termasuk terhadap pelaku kejahatan korupsi.

Publik merasa jengah mendapati situasi berlatar sebab eksternal. Kondisi ini terus terakumulasi dan berujung *distrust* atau ketidakpercayaan publik terhadap kinerja

pemerintah dalam menangani Covid-19. *Distrust* publik mendorong masyarakat untuk apatis atau bersikap acuh tak acuh terhadap setiap kebijakan yang pemerintah. Ketidakpatuhan atau pembangkangan sendiri menurut Fromm disebabkan oleh ketidakadilan dan tindakan yang bertentangan dengan nurani, akal budi dan nilai-nilai kemanusiaan. Publik menilai bahwa kebijakan pemerintah telah menciderai nurani, keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan.

Relasi antara pemerintah dan rakyat bersifat kausalitas atau berhubungan secara timbal balik. Keduanya terikat dalam satu kesatuan. Relasi ini dalam kacamata Fromm diilustrasikan dengan hubungan guru dan murid. Relasi antara guru dan murid meskipun bersifat struktural namun masing-masing bisa saling menerima. Apa yang diperintahkan guru kepada murid diikuti dan dipatuhi dengan baik oleh murid. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa baik guru dan murid menyadari dengan benar keberadaan masing-masing demi kepentingan dan kebutuhan dirinya.

Hal yang sama juga berlaku antara pemerintah dan masyarakat. Relasi pemerintah dan rakyat tidak ubahnya seperti relasi guru dan murid yang keduanya berhubungan secara interaktif. Pemerintah mengusahakan kepentingan rakyat dan rakyat secara

sukarela menyediakan dirinya untuk patuh diatur dan dikondisikan oleh pemerintah. Dalam perspektif yang lain, pemerintah bukan berkedudukan sebagai majikan dan rakyat bukan budak sehingga relasi yang ditunjukkan semestinya bukan dominasi atau menguasai. Pemerintah pada posisi ini menjalankan amanat rakyat dan bertanggung jawab penuh kepada rakyat. Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan rakyat. Situasi ini mengikat keduanya dan bersifat resiprokal.

Fromm menjelaskan bahwa perlawanan atau pembangkangan dapat dilakukan dalam konteks otoritas irasional. Otoritas irasional tidak memungkinkan seseorang untuk mengambil peran dan tanggung jawab. Alih-alih bersikap sportif justru yang ditampilkan adalah dominasi atau penguasaan terhadap yang lain. Relasi pemerintah dan rakyat ada dalam dimensi otoritas rasional. Kepatuhan kepada pemerintah sudah selayaknya dilakukan publik. Pemerintah dan rakyat berada dalam satu *track* yang sama. Sehingga kepatuhan publik kepada pemerintah dapat dibenarkan.

Terlepas dari varian ketidakpatuhan yang beragam, perlu dicermati bahwa pemerintah dan warga adalah entitas yang semuanya adalah korban. Dengan kata lain, mereka berjuang untuk bersama-sama bertahan dari cengkeraman Covid-19. Pemerintah dan warga

sejak awal telah memilih melawan Covid-19. Dalam perspektif Fromm, pemerintah dan warga menolak untuk patuh terpapar Covid-19. Pemerintah dengan segenap kebijakannya dapat dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan atau keengganan untuk tunduk dan patuh dalam cengkeraman Covid-19.

Tidak sepatutnya publik membangkang atau menolak patuh pada kebijakan pemerintah mengingat kebijakan pemerintah diarahkan untuk menyelamatkan warga dari belenggu Covid-19. Menolak patuh artinya siap dan bersedia terjangkiti Covid-19. Sebaliknya, pemerintah perlu bersikap lebih professional dalam upaya meningkatkan kepatuhan publik terhadap kebijakan pemerintah. Upaya tersebut jika diperlukan dibangun melalui suatu kesadaran dan bukan paksaan. Pemaksaan di banyak kesempatan kerap berakhir pada pembangkangan.

Pemerintah perlu merespon setiap keluhan, kritik dan kendala yang terjadi di lapangan. Respon ini penting karena melalui cara ini kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa pulih kembali. Pemerintah dalam posisi ini dinilai menciderai rakyat terutama melalui kebijakan-kebijakan yang bermasalah maka selayaknya pemerintah meninjau ulang kebijakan-kebijakannya dalam mengatasi Covid-19 dan merevisi secara tepat dan akurat sehingga kemanfaatannya bisa

dirasakan bersama dan tentu saja harapan keberhasilan penanganan Covid-19 bisa berjalan lebih optimal.

Ketidakpatuhan publik terhadap kebijakan pemerintah dapat diatasi melalui pendekatan yang tepat. Pemerintah perlu mendengar lebih banyak dan membuka ruang dialog agar masing-masing mengerti posisi dan tanggung jawabnya dalam situasi pandemi Covid-19. Publik pun perlu kembali menaruh kepercayaan kepada pemerintah agar pemerintah bisa bekerja secara optimal melalui dukungan penuh masyarakat. Pandemi Covid-19 dapat diatasi hanya jika semua pihak duduk bersama, saling berkomunikasi dan berkomitmen secara sungguh-sungguh menghadapi pandemi Covid-19.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pandemi Covid-19 melahirkan banyak persoalan di berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat. Pemerintah dalam situasi ini berupaya mengatasi penyebaran Covid-19 dengan menerapkan serangkaian kebijakan salah satunya melalui kebijakan protokol kesehatan. Namun dalam praktik di lapangan, kebijakan ini tidak berjalan secara optimal karena ditemukan sejumlah kasus pelanggaran protokol kesehatan. Publik dinilai tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Ketidakpatuhan publik berimplikasi pada meningkatnya angka penularan Covid-19. Ketidakpatuhan publik terhadap protokol kesehatan disebabkan sejumlah faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal datang dari internal masyarakat berupa sikap *denial* atau penyangkalan. Publik menolak patuh karena tidak mau tahu (skeptis dan apatis) dan menyangkal keberadaan Covid-19 dengan beranggapan bahwa Covid-19 hanya sekedar virus biasa dan bukan virus mematikan seperti informasi yang selama ini beredar.

Faktor eksternal ketidakpatuhan publik berasal dari luar masyarakat, biasanya mengambil bentuk *distrust*

atau ketidakpercayaan publik kepada pemerintah. Kegamangan pemerintah dalam mengambil kebijakan berimbas pada ketidakpercayaan publik kepada pemerintah. Publik menilai pemerintah tidak hanya gamang namun juga tidak transparan dan adil dalam menerapkan kebijakan. Pemerintah dianggap tidak konsisten terhadap aturan yang ditetapkannya sendiri. Akumulasi *distrust* berdampak pada pembangkangan publik terhadap protokol kesehatan. Ketidakpercayaan publik kepada pemerintah mengakibatkan publik menolak patuh terhadap protokol kesehatan.

Ketidakpatuhan dalam terminologi Erich Fromm berkaitan dengan kepatuhan heteronom dan kepatuhan otonom. Kepatuhan heteronom menyertakan pihak lain sebagai penyebab dan pengendali kepatuhan. Kepatuhan ini digerakkan oleh perasaan takut terhadap orang lain atau keinginan mendapatkan penghargaan dari pihak lain. Sebaliknya, kepatuhan otonom bergantung pada penilaian dan kesadaran dari diri sendiri. Kepatuhan otonom dikendalikan oleh internal manusia tanpa melibatkan peran orang lain. Manusia dalam hal ini mampu menentukan dan membedakan mana yang baik dan sebaliknya. Fromm menolak kepatuhan heteronom karena kepatuhan jenis ini tidak membuat manusia eksis sebagai dirinya sendiri. Lebih jauh, Fromm menawarkan perlawanan atau

pembangkangan kepada kepatuhan yang bertentangan dengan nurani, nilai-nilai kemanusiaan dan akal budi.

Kepatuhan menurut Fromm tidak terlepas dari problem kesadaran, kesadaran dibedakan menjadi kesadaran nurani dan kesadaran otoriter. Kesadaran nurani berasal dari suara terdalam manusia atau suara murni yang menyeru manusia untuk selaras dengan kodratnya. Kesadaran ini disebut dengan kesadaran humanistik. Manusia patuh karena apa yang dipatuhinya itu bersesuaian dengan nilai-nilai nurani dan kemanusiaan. Kesadaran humanistik berbeda dengan kesadaran otoriter yang menyandarkan kepatuhan pada pertimbangan eksternal atau di luar dirinya. Manusia patuh karena dipengaruhi oleh keberadaan yang lain. Pengaruh tersebut hadir melalui perasaan cemas atau takut. Perasaan inilah yang pada akhirnya mendorong seseorang untuk bersikap patuh. Kepatuhan bagi Fromm bisa diterima hanya jika dalam konteks relasi antar manusia terdapat hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dan bukan kepatuhan sepihak yang saling menguasai atau mendominasi.

Fromm menolak pandangan bahwa ketidakpatuhan itu negatif. Demikian pula dengan anggapan bahwa kepatuhan itu positif. Penilaian positif atau negatif dari tindakan patuh atau tidak patuh bergantung sepenuhnya pada tujuan atau motif dari tindakan tersebut. Fromm

menghendaki agar tindak kepatuhan dan ketidakpatuhan dibingkai oleh kesadaran berlandaskan nurani, akal budi dan nilai-nilai kemanusiaan dan bukan karena keterpaksaan atau dorongan rasa takut.

Kebijakan pemerintah menanggulangi pandemi Covid-19 dapat dimaknai sebagai bentuk perlawanan terhadap Covid-19. Pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia dalam hal ini menolak tunduk patuh dalam cengkeraman Covid-19. Ketidakpatuhan terhadap Covid-19 didasarkan pada kenyataan bahwa Covid-19 membahayakan kehidupan. Kenyataan ini memaksa seluruh masyarakat untuk tidak tenggelam dalam pandemi, sebaliknya bersama-sama mengambil inisiatif untuk saling bersinergi memerangi Covid-19.

Ketidakpatuhan publik terhadap kebijakan protokol kesehatan dapat dilihat dari berbagai sisi. Ketidakpatuhan tidak dibenarkan atas dasar pertimbangan berikut; *Pertama*, Covid-19 adalah musuh bersama. Menolak patuh beresiko pada ketidaktetapan upaya penanggulangan Covid-19. Pandemi Covid-19 menuntut kerjasama banyak pihak terutama dalam hal ini pemerintah dan warga masyarakat guna mengurangi angka penyebaran Covid-19. *Kedua*, Persepsi atau keyakinan pribadi yang menganggap Covid-19 sebagai penyakit biasa atau bahkan menolak keberadaan Covid-19. Menolak fakta

Covid-19 berdampak pada apatisme dan sikap meremehkan upaya-upaya penanganan Covid-19. Demikian pula dengan keyakinan pribadi. Keyakinan pribadi yang irasional menghambat kerja keras mengatasi Covid-19.

Ketidakpatuhan dibenarkan dalam situasi berikut; *Pertama*, pemerintah abai dan tidak konsisten dalam penerapan kebijakan terkait Covid-19. Kebijakan pembatasan sosial tidak diikuti kebijakan ekonomi yang menjamin penghidupan masyarakat. Pemerintah tidak memberikan pilihan lain bagi warga yang terdampak secara sosial dan ekonomi. Pilihan pintas yang diambil warga adalah tetap berkegiatan ekonomi meski harus berhadapan dengan resiko terpapar Covid-19. *Kedua*, Tidak ada informasi yang valid tentang Covid-19. Kesimpangsiuran informasi perihal Covid-19 membuat publik enggan patuh terhadap protokol kesehatan. Pemerintah tidak memberikan informasi yang memadai kepada publik. Sehingga publik tidak memiliki pegangan yang cukup bagaimana seharusnya bersikap di masa pandemi.

Ketidakpatuhan dan kepatuhan dalam perspektif Fromm membuka ruang seluas-luasnya bagi manusia untuk menyadari eksistensi secara bertanggung jawab. Pilihan untuk tidak patuh atau membangkang adalah pilihan yang sangat rasional dan wajib diperjuangkan

manakala didapati perkara-perkara yang menciderai atau menyelisihi nurani, akal sehat dan nilai-nilai kemanusiaan. Publik akan patuh mengikuti kebijakan pemerintah terkait Covid-19 hanya jika pemerintah benar-benar peduli pada kepentingan masyarakat dan konsisten baik dalam penerapan kebijakan maupun penegakan hukum.

B. Saran

Ada banyak aspek yang dapat diteliti terkait objek formal maupun objek material yang digunakan dalam penelitian. Penelitian berikutnya bisa dilakukan dengan memperluas atau mengganti objek material penelitian ataupun menerapkan perspektif lain dalam menganalisis objek material. Erich Fromm sendiri memiliki banyak tulisan dengan beragam tema. Perspektif Fromm yang kaya dan lintas disiplin keilmuan akan sangat menarik untuk diterapkan di berbagai tema-tema aktual terutama tema Covid-19 yang tengah hangat.

Objek material yang digunakan dalam penelitian ini dapat diperluas dengan memasukkan aspek lain sejauh relevan dengan perspektif yang diterapkan. Covid-19 memberikan banyak tawaran untuk diteliti lebih lanjut dengan beragam perspektif dan pisau analisis. Fakta bahwa pandemi Covid-19 masih berlangsung hingga

saat ini membuka kesempatan bagi kebaruan dalam penelitian. Sehingga dalam penelitian selanjutnya akan ada banyak hal bermanfaat yang bisa dihasilkan melalui penelitian tentang Covid-19 maupun penelitian berperspektif Erich Fromm.

DAFTAR PUSTAKA

- 10 Negara Paling Berhasil Tangani Covid, Indonesia Termasuk?, [m,republik.co.id/berita/qnn4qf383/10-negara-paling-berhasil-tangani-covid-indonesia-termasuk](https://m.republik.co.id/berita/qnn4qf383/10-negara-paling-berhasil-tangani-covid-indonesia-termasuk). (29 Januari 2021).
- Afrianti, Novi dan Cut Rahmiati, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Covid-19", *Jurnal Ilmiah Permas*, Vol. 11, No. 1, Januari 2020, hal. 113-124.
- Bakker, Anton dan Charris Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Davis, Mike. *Datangnya Pagebluk; Covid-19, Flu Burung dan Wabah Kapitalisme*. terj. Kumala Sari. Yogyakarta: Penerbit Independen, 2021.
- Erich Fromm. www.britannica.com/biography/Erich-Fromm.
- Fromm, Erich. *Perihal Ketidakpatuhan*. terj. M. Isran. Yogyakarta: Ircisod, 2020.
- *Dari Pembangunan menuju Sosialisme Humanistik*. terj. Th. Bambang Murtianto. Jakarta; Pelangi Cendekia, 2019.
- Gallagher, James. Covid-19: Mengapa virus corona sangat mematikan, www.bbc.com/indonesia/majalah-54640391.amp. (23 Oktober 2020).

Ghiffari, Ahmad, dkk. "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ketidakpatuhan Masyarakat Menggunakan Masker Pada Saat Pandemi Covid-19 di Palembang". *Prosiding Seminar Nasional Stikes Syedza Saintika*, Vol. 1, No. 1, 2021, hal. 450-458.

Harjudin, Laode. "Dilema Penanganan Covid-19 antara Legitimasi Pemerintah dan Kepatuhan Masyarakat". *Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, Vol. 1, No. 1, Mei 2020, hal. 90-97.

Harmawati dan Etri Yanti. "Kepatuhan Pengunjung Puskesmas terhadap Protokol Kesehatan 3 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak dan Menghindari Kerumunan)". *Jurnal Abdimas Saintika*, Vol. 3, No. 1, 2021, hal. 94-97.

Ilmuwan sebut Covid-19 bukan lagi pandemi, melainkan sindemi,
[www.kontan.co.id/news/ilmuwan-sebut-covid-19-bukan-lagi-pandemi-melainkan –sindemi](http://www.kontan.co.id/news/ilmuwan-sebut-covid-19-bukan-lagi-pandemi-melainkan-sindemi). (13 November 2020).

Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama dan Humaniora*. Yogyakarta: Paradigma, 2012.

Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Harus Ditingkatkan,
www.covid.go.id/p/berita/kepatuhan-masyaakat-

terhadap-protokol-kesehatan-harus-ditingkatkan, (3 Desember 2020).

Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan belum Optimal, www.kemkes.go.id/article/view/20062200002/kepatuhan-masyarakat-terhadap-protokol-kesehatan-belum-optimal, (22 Juni 2020).

Kepatuhan Protokol Kesehatan Terbukti Menekan Penularan Covid-19, m.merdeka.com/pertistiwa/kepatuhan-protokol-kesehatan-terbukti-menekan-penularan-covid-19. (4 Februari 2021).

Lumbanrau, Raja Eben. Covid19-Indonesia terus naik: Orang yang tak taat protokol makin banyak karena masyarakat menengah tak paham?, www.bbc.com/indonesia-53553408.amp, (4 Agustus 2020).

Makin Patuh 3 m, 84 Persen Masyarakat Sudah Disiplin Pakai Masker, www.jawapos.com/nasional/27/10/2020/makin-patuh-3m-84-persen-masyarakat-sudah-disiplin-pakai-masker/%3famp, (27 Oktober 2020).

Mengikis Ketidapatuhan pada Protokol Kesehatan, news.detik.com/kolom/d-5164090/mengikis-ketidapatuhan-pada-protokol-kesehatan, (8 September 2020).

Merunut Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19 di Indonesia, kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/merunut-kebijakan-penanganan-wabah-covid-19-di-indonesia. (3 Juli 2020).

Moeldoko: Rumah Sakit Jangan Semua pasien Dicoovidkan, m.merdeka.com/peristiwa/moeldoko-rumah-sakit-jangan-semua-pasien-meninggal-dicoovidkan.html. (1 Oktober 2020).

Rachmawan, Dicky. Melampaui "Ketidakpatuhan Masyarakat", Kebingungan dan Keacuhan dalam Kejenuhan Perdebatan yang Tiada Henti. www.pmb.lipi.go.id/melampaui-ketidakpatuhan-masyarakat-kebingungan-dan-keacuhan-dalam-kejenuhan-perdebatan-yang-tiada-henti. (15 Oktober 2020).

Riset PolGoV UGM Ungkap Sinisme Publik pada pemerintah Dalam Tangani Covid-19, www.ugm.ac.id/id/berita/19491-riset-polgov-ugm-ungkap-sinisme-publik-pada-pemerintah-dalam-tangani-covid-19. (1 Juni 2020).

Sari, Ratna Kartika. "Identifikasi Penyebab Ketidakpatuhan Warga terhadap Penerapan Protokol Kesehatan 3 M di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pelanggar Protokol Kesehatan 3 M

di Ciracas Jakarta Timur)". *Jurnal AKRAB JUARA*, Vol. 6. No. 1. Februari 2021, hal. 84-94.

Strauss, Anselmus and Juliet Corbin. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Terj. M. Shodiq dan Imam Muttaqien. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Survei BPS: Warga Patuh Pakai Masket, Tapi Abai jaga Jarak, www.republika.id/amp/qhd311370. (28 September 2020).

Tuluangagung villagers stand fast against Covid-19 with spiritual boost from ‘tetekmelek’, www.thejakartapost.com/life.2021/03/05/tuluangagung-villagers-stand-fast-against-covid-19-with-spiritual-boost-from-tete-melek.html. (8 Maret 2021).

Yuliana, "Coronavirus Disease (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur". *Wellness and Healthy Magazine*, Vol. 2, No. 1, Februari 2020, hal. 187-192.

Yunus, N. R dan Anissa Rezki. "Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19", *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* , Vol. 7 No. 3. (2015), hal 227-238.

